

**KERUKUNAN DI PURA EKA DHARMA
KASIHAN BANTUL
(Studi Kerukunan Multikultural)**



SKRIPSI

Diajukan Pada Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat Memperoleh Gelar Sarjana Theologi
Islam (S. Th. I)

Disusun Oleh :

SUSANTI

NIM : 04521724

**JURUSAN PERBANDINGAN AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2009

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Susanti
NIM : 04521724
Jurusan : Perbandingan Agama
Fakultas : Ushuluddin
Semester : IX

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi saya ini (tidak terdapat karya yang diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan skripsi saya ini) adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain.

Yogyakarta, Januari 2009
Yang membuat pernyataan,


Susanti
04521724

Drs. Rahmat Fajri, M. Ag.
Dosen Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari
Susanti

Lamp : -

Kepada Yth
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesudah beberapa kali melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan, dan membaca skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

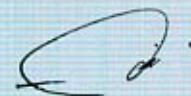
Nama : Susanti
NIM : 04521724
Jurusan : Perbandingan Agama
Judul Skripsi : **KERUKUNAN DI PURA EKA DHARMA
KASIHAN BANTUL (Studi Kerukunan
Multikultural)**

Maka selaku pembimbing, saya berpendapat bahwa skripsi tersebut layak diajukan untuk dimunaqasyahkan.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Januari 2009

Pembimbing



Drs. Rahmat Fajri, M. Ag.
NIP. 150275041



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA

FAKULTAS USHULUDDIN

Jln. Laksda Adisucipto – YOGYAKARTA – Telp. 512156

PENGESAHAN

Nomor : UIN/DU/PP.00.9/0169/2009

Skripsi dengan judul :

**KERUKUNAN DI PURA EKA DHARMA KASIHAN BANTUL
(Studi Atas Masyarakat Multikultural)**

Diajukan Oleh :

Nama : Susanti
NIM : 0452 1724
Program Sarjana Strata Satu Jurusan : Perbandingan Agama

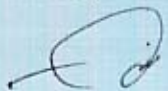
Telah dimunaqosyahkan pada hari Jum'at, tanggal 23 Januari 2009 dengan nilai 81,6 (B+) dan telah dinyatakan sah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam ilmu Theologi Islam.

TIM MUNAQOSYAH

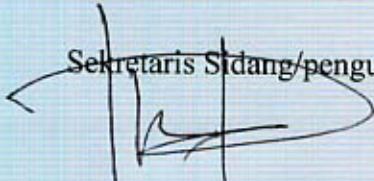
Penguji I

Drs. Singgih Basuki, M. A.
NIP. 150 210 064

Ketua Sidang/Pembimbing


Drs. Rahmat Fajri, M.Ag.
NIP. 150275041

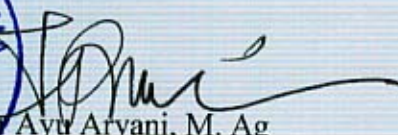
Sekretaris Sidang/penguji II


Moh. Soehadha, S.Sos, M.Hum
NIP. 150 291 739



Yogyakarta, 23 Januari 2009

DEKAN


Dekan Ayu Aryani, M. Ag
NIP. 150 232 692

MOTTO

“Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan berhasil”

*“MENGETAHUI TIDAKLAH CUKUP,
KITA HARUS MENERAPKANNYA.
BERKEHENDAK TIDAKLAH CUKUP,
KITA HARUS MELAKUKANNYA”
(Goethe)*

PERSEMBAHAN

*Teriring ucap syukur Alhamdulillahirabbil 'alamin.
Kupanjatkan kehadiran Illahi Rabbi atas rahmat, kasih dan pertolongan-Nya
Sholawat dan salam atas Nabi Muhammad
Sang pembawa "tali pegangan" berupa Islam.
Skripsi ini kupersembahkan kepada:*

- *Bapak dan mamak
Yang selalu berharap agar anak-anaknya menjadi orang yang berguna*
- *Kakak2Q, Uda beserta keluarga, Nita dan mas udin, ni dewi
Yang selalu memberi dorongan serta semangat kepada penulis*
- *adek2Q, Rinto dan Ida*
- *ponakan2 yang lucu-lucu dan ngegemesi*
- *Teman2Q, "PA 2004", oca dan keluarga, jeng dan si hitamnya serta
anak2 kost Melati beserta Bapak dan Ibu Kost
Yang selalu memberi dorongan serta semangat kepada penulis
Dan*
- *Muhammad Jurjani
Yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis*

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam. Sholawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman.

Dengan ucap penuh syukur kehadiran Allah SWT, bahwa atas hidayah dan rahmat-Nya skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan judul KERUKUNAN DI PURA EKA DHARMA KASIHAN BANTUL (Studi Kerukunan Multikultural), skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan di bidang Perbandingan Agama dalam ilmu Ushuluddin.

Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih kepada mereka yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini, khususnya kepada :

1. Dekan Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah memberi izin dalam penulisan skripsi ini.
2. Ketua dan Sekretaris Jurusan Perbandingan Agama, yang telah memberikan dorongan ataupun motivasi sehingga terwujudnya skripsi ini.
3. Bapak Singgih Basuki selaku Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan nasehat juga arahnya demi mengantarkan penulis kepada skripsi ini.
4. Bapak Drs. Rahmat Fajri, M.Ag selaku pembimbing yang telah meluangkan waktunya dengan memberikan pengarahan dan masukan dalam penulisan skripsi ini.

5. Ayah, Ibu, kakak-kakakku serta adik-adikku tercinta yang tiada hentinya mendorong penulis menuntaskan kerja penulisan dengan segenap doa dan pengorbanan.
6. Teman-teman yang telah banyak membantu baik berupa pikiran maupun tenaga sehingga skripsi ini dapat selesai.

Atas dorongan dan bantuan dari semua pihak yang terdisebut di atas, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dan semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas jasa-jasa mereka.

Akhirnya harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya. Amin.

Yogyakarta, Januari 2009

Penulis

(SUSANTI)

ABSTRAK

Kerukunan hidup umat beragama merupakan faktor penting bagi proses integrasi bangsa. Kerukunan itu bukan didasari atas sikap sinkretis yang dibuat-buat, melainkan suatu kondisi bahwa semua golongan agama bias hidup bersama-sama tanpa mengurangi hak masing-masing umat untuk melaksanakan kewajiban agamanya. Yogyakarta merupakan salah satu kota yang memiliki kapasitas penduduk yang besar, dikarenakan banyaknya pendatang yang datang ke kota ini dengan tujuan yang berbeda-beda, yang semakin melengkapi unsure kemajemukan masyarakat Yogya yang terdiri dari beraneka ragam suku, ras, budaya, agama serta golongan. Kota ini mendapat julukan sebagai barometernya Indonesia, karena dapat dijadikan tolok ukur dalam keberanekaragaman Indonesia dilihat dari suku, agama dengan membawa budaya dan adat istiadat mereka ke sini.

Kemajemukan, selain menjadi sumber kemajuan juga menjadi sumber konflik yang dapat mengancam keharmonisan antar masyarakat. Potensi konflik berbasis agama bukan tidak ada di lingkungan pura ini, akan tetapi mekanisme pencegahan konflik berjalan dengan baik di masyarakat. Berangkat dari sinilah, penelitian yang mengambil judul “KERUKUNAN DI PURA EKA DHARMA (Studi Kerukunan Multikultural) diangkat. Adapun rumusan masalahnya membahas tentang faktor perekat kerukunan multikultural di lingkungan pura Eka Dharma dan peran pura Eka Dharma dalam menciptakan kerukunan multikultural. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor perekat kerukunan multikultural di lingkungan pura Eka Dharma sekaligus peran pura Eka Dharma dalam menciptakan kerukunan multikultural.

Data dalam penelitian ini, diperoleh dari studi lapangan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi serta didukung penelitian pustaka. Data yang terkumpul melalui studi lapangan dan pustaka dianalisis dengan teknik/metode deskriptif analisis artinya setelah dianalisis kemudian dituangkan dalam bentuk pemaparan yang sesuai dengan keadaan obyek yang sebenarnya. Sesuai dengan data dan judul dalam penelitian ini, maka pendekatan yang dipakai adalah pendekatan sosiologis.

Dengan demikian, penelitian ini menggarisbawahi : *Pertama*, tentang faktor perekat terciptanya kerukunan di lingkungan pura Eka Dharma dikarenakan adanya pemahaman dan pengamalan masing-masing umat menurut ajaran dan kepercayaannya, kondisi keamanan dan ketertiban yang kondusif di lingkungan pura, kondisi sosial dan ekonomi yang stabil di masyarakat sekitar, dan faktor pendidikan ikut pula mengambil peranan dalam menciptakan kerukunan multikultural. *Kedua*, tentang peranan pura Eka Dharma dalam menciptakan kerukunan multikultural yaitu dengan mengadakan forum pertemuan antar pemuka agama dengan umatnya, pembentukan kader kerukunan antar umat beragama, membina serta memupuk sikap hidup rukun.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kajian Pustaka	10
E. Kerangka Teori	12
F. Metodologi Penelitian.....	23
G. Sistematika Pembahasan.....	25
BAB II. GAMBARAN UMUM PURA EKA DHARMA.....	27
A. Letak Geografis.....	27
B. Sejarah Berdiri dan Sejarah Perkembangan Pura.....	27
C. Kondisi umat beragama di Pura Eka Dharma.....	32
BAB III. KONSEP-KONSEP TENTANG KERUKUNAN MULTIKULTURAL	33
A. Kerukunan Multikultural Sebagai Sebuah Fenomena Keragaman dan Tonggak Pemersatu Agama-agama.....	33
B. Multikulturalisme Ditinjau dari Perspektif Teori	39
C. Pola-pola dalam Mencapai Kerukunan Multikultural.....	43

D. Hambatan-hambatan Yang Menjadi Kendala Mewujudkan Kerukunan Berwawasan Multikultural	45
BAB IV. KERUKUNAN DI PURA EKA DHARMA	46
A. Faktor-faktor terciptanya kerukunan di Pura Eka Dharma.....	46
B. Peran Pura Eka Dharma demi Menciptakan Kerukunan dalam Kajian Multikultural	50
BAB V. PENUTUP.....	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran-saran.....	55
C. Kata Pengantar	56
DAFTAR PUSTAKA	57
CURRICULUM VITAE	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah negara yang kompleks dengan kemajemukan dan berbagai macam keberanekaragaman, baik suku, bahasa, adat istiadat, budaya, pola hidup maupun agama. Oleh karena itu, secara historis-kultural bangsa Indonesia bersifat religius karena pertumbuhan kebudayaan Indonesia sangat dipengaruhi dan diwarnai oleh nilai-nilai dan norma-norma agama.¹ Agama menjadi sebuah pilihan utama manusia dalam membimbing keyakinan yang dimilikinya. Agama juga dipakai sebagai sebuah identitas atau penanda yang membedakan antara satu dengan lainnya.

Salah satu fungsi dari agama adalah memupuk persaudaraan antar umat manusia yang bercerai berai. Kerukunan sebagai fakta hanya terdapat pada umat pemeluk agama yang sama, sebaliknya perbenturan yang banyak terjadi antar golongan pemeluk agama yang berlainan tidak sedikit menodai lembaran-lembaran sejarah. Keadaan ini tentu saja menjadi penyebab utama adanya saling tuduh dalam kehidupan masyarakat yang disebabkan adanya perbedaan iman.² Hal itu juga didukung oleh faktor sejarah masa lampau yang kelam yaitu antar agama yang satu dengan lainnya masih menyimpan dendam sampai dengan sekarang. Namun tidak menutup kemungkinan konflik juga terjadi dalam intern agama sendiri, antara lain perbedaan pendapat dalam memahami ajaran agama juga dapat menimbulkan konflik

¹Ahmad Marzuki, *Pembinaan Kehidupan Beragama Dalam Masyarakat Untuk Mensukseskan Pembangunan* (Jakarta : Departemen Agama, 1981), hlm. 9.

²Hendro Puspito, *Sosiologi Agama* (Yogyakarta : Kanisius, 1982), hlm. 169.

dalam intern agama, hanya saja hal itu tidak membesar dan tidak mengakar permasalahan yang lebih serius lagi.

Dalam sejarah perkembangannya, agama Hindu termasuk agama tertua yang masih berkembang hingga sekarang. Kelahiran agama ini bersamaan dengan munculnya agama Persia Kuno.³ Data statistik menjelaskan pada tahun 2000 tercatat 80,31% penduduk Indonesia adalah Muslim; 7,9% Protestan; 10,67% Katolik; 0,46% Hindu; 0,66% Buddha.⁴ Ini menunjukkan adanya pluralitas agama sebagai suatu kenyataan historis bagi masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang tidak bisa diingkari.

Kehadiran agama-agama besar seperti Islam, Kristen(Protestan), Katolik, Hindu, Buddha serta lainnya semakin melengkapi unsur kemajemukan masyarakat Indonesia yang didasarkan pada pluralitas suku, adat, budaya, dan bahasa.

Dalam kemajemukan masyarakat tersebut, maka agama sebagai sistem acuan nilai bagi sikap dan tindakan dapat mengarah kepada suasana masyarakat yang rukun dan sekaligus dapat menjadi sumber konflik.⁵

Pluralitas agama harus dipahami secara wajar dengan penuh kesadaran, yaitu kenyataan akan adanya saling ketergantungan antar-pelbagai pihak yang berbeda agama. Pluralitas tidak hanya sebatas mengakui kemajemukan, namun harus terlibat dengan aktif dan baik dalam kemajemukan. Tetapi harus diingat bahwa pluralitas

³Arifin, *Menguak Misteri Ajaran Agama-Agama Besar* (Jakarta : Golden Taravon Press, 1997), hlm. 57.

⁴ Kantor Wilayah Departemen Agama Riau, tahun 2002.

⁵Zainuddin Daulay dkk, *Riuh Di Beranda : Peta Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia* (Bagian Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragama, Pusat Litbang Beragama, Badan Litbang Agama & Diklat Keagamaan, Departemen Agama RI, 2002), hlm. 142.

bukan menaifkan agama-agama, bukan pula sinkretis terhadap agama, namun mengakui adanya relativisme dalam agama.⁶

Untuk mengimbangi adanya kemajemukan tersebut maka diperlukan suasana hidup rukun, damai dan harmonis antar umat beragama. Secara ideologis, agama menjanjikan kebaikan dan perdamaian. Secara praktis semakin manusia taat kepada agamanya, ia juga semakin tidak toleran terhadap orang lain karena hal ini dapat mengganggu kerukunan hidup beragama. Dalam hal ini, agama harus dilihat sebagai masalah kebudayaan pranata sosial atau juga sebagai seperangkat simbol-simbol yang digunakan dalam kehidupan sosial manusia.⁷

Dalam toleransi hidup umat beragama, kita dapat menerima prinsip-prinsip saling mengerti, menghormati dan memahami urusan intern masing-masing umat beragama, antar umat beragama serta umat beragama dan pemerintah. Selanjutnya untuk menjaga kondisi ini, perlu diciptakan situasi yang masing-masing golongan dapat berpegang teguh kepada ajarannya disertai dengan sikap saling menghormati dan jangan sampai merugikan kepentingan orang lain.⁸

Agama Hindu adalah agama yang mengajarkan ajaran yang universal. Ia memberikan kebebasan kepada penganutnya untuk menghayati dan merasakan sari ajarannya. Penganut Hindu tidak hanya menghafalkan apa yang diajarkan kitab sucinya tetapi juga menerapkannya dalam aspek kehidupan sehari-hari. Dengan sifatnya yang universal, maka agama Hindu bukanlah agama untuk satu golongan atau bangsa saja. Weda sebagai kitab suci agama Hindu diyakini bersumber dari Ida Sang

⁶Burhanuddin Daya, *Agama Dialogis : Merenda Dialektika idealita dan Realita hubungan Antar Agama* (Yogyakarta : Mataram Minang Lintas Budaya, 2004), hlm. 173.

⁷Parsudi Suparlan,(ed). *Pengetahuan Budaya, Ilmu-ilmu Sosial dan Pengkajian Masalah Agama* (Jakarta : Proyek Penelitian Keagamaan BALITBANG Depag RI, 1981-1982), hlm. 76.

⁸Departemen Agama, " *Kerukunan Intern Umat Beragama Sebagai Sarana Bagi Terciptanya Ukhuwah Islamiyah*" (makalah yang disampaikan dalam forum Musyawarah Umat Beragama Departemen Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta , 2001), hlm. 2.

Hyang Widhi Wasa yang diwahyukan melalui pendengaran suci para maha Resi pada zaman dahulu. Weda diyakini oleh umat Hindu sebagai “*anadi-ananta*“ yakni tidak berawal atau tidak diketahui kapan diturunkan dan berlaku sepanjang zaman. Semua ajaran Hindu bernafaskan Weda, walaupun seringkali dalam bentuknya yang lain. Semangat ajaran Weda meresapi seluruh ajaran Hindu.⁹

Weda adalah kitab suci agama Hindu. Sebagai kitab suci agama Hindu maka ajaran Weda diyakini dan dipedomani oleh umat Hindu sebagai satu satunya sumber bimbingan dan informasi yang diperlukan dalam hidup dan kehidupan. Diyakini sebagai kitab suci karena sifat isinya dan yang menurunkannya adalah Ida Sang Hyang Widhi Wasa (Tuhan Yang Maha Esa) yang Maha Suci. Dari kitab suci Weda, mengalirkan ajaran Weda kepada kitab-kitab Smerti (Manawadarmasastra), Itihasa, Purana, Kitab-kitab agama, Tantra, Darsana dan Tattwa-tattwa yang ada di Indonesia. Weda mengandung ajaran yang memberikan keselamatan di dunia dan setelah meninggalnya nanti. Weda menuntun hidup umat manusia, menuntut hidup manusia dalam bermasyarakat. Dalam kitab Manawadharmasastra disebut. “*Weda adalah sumber dari segala dharma, yakni agama kemudian barulah Smerti, disamping sila (kebiasaan atau tingkahlaku yang baik dari orang yang menghayati dan mengamalkan ajaran Weda) dan kemudian Acara yakni tradisi yang baik dari orang-orang suci atau masyarakat yang diyakini baik serta akhirnya Amatusti, yakni rasa puas diri yang dipertanggung jawabkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa*”.¹⁰

Dalam agama Hindu antara agama dan kultur (budaya) masyarakat terjalin suatu hubungan yang selaras dan saling mempengaruhi. Karena tidak jarang dalam pelaksanaan agama terkait dengan pelaksanaan budaya masyarakat setempat. Apabila

⁹ Sahnun Ginting, “Pola Pengembangan Kerukunan Berwawasan Multikultural Dari Sudut Pandang Agama Hindu”, dilihat dalam <http://www.Hindu-Indonesia.com>, diakses tanggal 18 Agustus 2008.

¹⁰ *Ibid.*

kita menoleh kembali pada awal masuknya Hindu ke Nusantara, maka jelas bagi kita bahwa Hindu membawa misi yang damai tanpa merusak budaya masyarakat yang dilaluinya, namun Hindu dapat memperkaya nilai-nilai budaya setempat, sehingga ajaran Hindu dengan mudah dapat diserap dan dapat berkembang serta mencapai puncak kejayaannya pada kejayaan kerajaan Majapahit di Jawa Timur.¹¹

Tumbuh dan berkembangnya budaya suatu daerah dapat dijadikan sebagai warna tersendiri sebagai lapisan paling luar dari agama Hindu, namun inti dari keyakinan Hindu itu sendiri tetap sama pada setiap daerah. Kalau dilihat dari fakta sejarah, wujud dari budaya agama itu dari zaman ke zaman mengalami perubahan bentuk, namun tetap memiliki konsep yang konsisten artinya prinsip ajaran agama itu tidak berubah yaitu bertujuan menghayati Ida Sang Hyang Widi Wasa itulah yang mengilhami tumbuh dan berkembangnya budaya agama dan ini pula yang melahirkan variasi bentuk budaya agama.¹²

Penghayatan kepada Tuhan dapat dilakukan dengan mengembangkan nilai budaya. Salah satu pola yang dikembangkan adalah melalui budaya agama. Budaya agama dikembangkan lagi melalui pendalaman sastra-sastra yang ditulis oleh para tokoh agama (Para Maha Resi, para Rakawi, Bhagawan) yang bersumber dari kitab Weda. Budaya agama melahirkan upacara agama. Dengan pelaksanaan budaya agama maka dapat dikembangkan nilai-nilai kerukunan, baik kerukunan intern umat beragama maupun kerukunan antar umat beragama.¹³

Kerukunan antar umat beragama menurut sudut pandang agama Hindu adalah ajaran yang dapat mengilhamkan pikiran dan perasaan kita sehingga dapat

¹¹Thomas Reuter, "Kebangkitan Gerakan Agama Hindu di Jawa", dilihat dalam <http://www.hindu-Indonesia.com>, diakses tanggal 30 Agustus 2008

¹²Sahnan Ginting, "Pola Pengembangan Kerukunan Berwawasan Multikultural Dari Sudut Pandang Agama Hindu", dilihat dalam <http://www.Hindu-Indonesia.com>, diakses tanggal 18 Agustus 2008.

¹³ *Ibid.*

menghilangkan kegelapan dan membuka wawasan hidup yang mengarah pada tatanan kehidupan yang guyub rukun bersatu padu, bau membau satu sama lain sehingga mampu mewujudkan kondisi yang aman damai sejahtera lahir batin.¹⁴

Kerukunan hidup Umat beragama merupakan faktor penting bagi proses integrasi bangsa. Kerukunan ini bukanlah didasari atas sikap sinkretis yang dibuat-buat, melainkan adalah suatu kondisi sosial, dimana semua golongan agama bisa hidup bersama tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya.¹⁵ Seperti yang diungkapkan Smith, bahwa pluralisme agama tetap akan memunculkan problema yang dapat mengganggu umat beragama.¹⁶

Salah satu penyebabnya adalah karena setiap umat beragama memiliki sikap prasangka (prejudice), suatu kesombongan khayal dengan dasar keyakinan bahwa agamanya paling benar. Hal ini melahirkan sikap memandang rendah umat agama lain dan memandang segala sesuatu yang ada dalam agama lain salah dan bodoh. Ketika sikap ini dipertahankan oleh masing-masing umat beragama, maka konflik antar umat beragama tidak dapat dihindarkan.¹⁷ Untuk menghindari konflik atau salah penafsiran antar agama maka diperlukan adanya dialog antar umat beragama sebagai sebuah sarana pembelajaran masing-masing umat.

Adapun obyek kajian dalam penelitian saya ini mengambil tempat di Yogyakarta yang lebih dikenal sebagai kota pendidikan, kota pelajar, kota seni, kota budaya dan kota yang ramah baik itu lingkungan maupun penduduknya, yang berada

¹⁴Sucipto, Kerukunan Umat Beragama Dari Sudut Pandang Agama Itu (makalah yang disampaikan dalam forum Musyawarah Antar Umat Beragama Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta : Departemen Agama, 4 September 2001).

¹⁵Zamari, *Kondisi Umat Beragama* (Yogyakarta : Departemen Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, 2001).

¹⁶Wilfred Cenwill Smith, *Religious Diversity* (New York : Harper and Row Publisher, 1976), hlm. 5.

¹⁷Hendro Puspito, *Sosiologi Agama* (Yogyakarta : Kanisius, 1983), hlm. 5.

tepatnya di pura Eka Dharma Kasihan Bantul. Mayoritas penduduk Yogyakarta adalah etnis Jawa, namun kota ini juga disebut sebagai miniatur Indonesia karena pada kenyataannya suku, ras, budaya, agama dan golongan yang ada di Indonesia tinggal di wilayah ini.

Yogyakarta mempunyai beberapa karakteristik dan keistimewaan yang membedakan dengan daerah lain, terutama karena sangat diwarnai kehidupan beragama yang melekat dalam perkembangan sosial masyarakat. Diantara karakteristik sosial masyarakat Yogya yang menonjol adalah sikap toleransi yang tinggi, menjunjung nilai-nilai budaya termasuk nilai dan tradisi kerakyatan, kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sosial tanpa harus terpengaruh terhadap intervensi eksternal dan sebagainya. Dengan sikap toleran yang tinggi, keberagaman penduduk tidak menjadi masalah, namun justru memperkuat ketahanan sosial.

Pura Eka Dharma Merupakan salah satu dari pura yang ada di Yogyakarta tepatnya di Gonjen Kasihan Bantul Yogyakarta yang menyungsung kurang lebih 110 KK. Dilihat dari letak pura yang dekat dengan pemukiman penduduk, tidak menghalangi jalannya peribadatan yang dilakukan di pura ini. Umat Hindu yang melakukan peribadatan di pura ini tidak hanya umat setempat saja, akan tetapi banyak juga yang berasal dari desa tetangga seperti Sumberan dan Kembaran.

Kerukunan yang terjalin antar tiap-tiap penduduk terlihat dalam setiap kegiatan yang dilakukan bersama, baik itu kerja bakti maupun kegiatan sosial lainnya. Ini terlihat pada waktu menyambut detik kemerdekaan Indonesia yaitu pada tanggal 17 Agustus yang lalu. Semua elemen masyarakat ikut berpartisipasi menyumbangkan tenaga, pikiran juga kreatifitas demi memeriahkan acara tersebut. Dari pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama sampai dengan penduduk biasa ambil

bagian dalam kegiatan itu. Tidak ada pengelompokan baik berdasarkan warna kulit, etnis, bahasa bahkan agama disini. Semua bersatu, bahu membahu menyambut hari kemerdekaan dengan penuh suka cita.

Kemajemukan, selain menjadi sumber kemajuan juga menjadi sumber konflik yang dapat mengancam keharmonisan antar masyarakat. Potensi konflik berbasis agama bukan tidak ada di lingkungan pura ini, akan tetapi mekanisme pencegahan konflik berjalan dengan baik di masyarakat.

Berangkat dari latar belakang masalah diatas, penulis disini tertarik untuk melakukan penelitian dengan melihat hubungan antar penganut agama yang berbeda terhadap tindakan kerukunan yang tercipta disekitar pura. Adapun fokus kajian penelitian ini mengambil judul “Kerukunan Di Pura Eka Dharma Kasihan Bantul (Studi Kerukunan Multikultural)”.

B. Rumusan Masalah

Dalam setiap penulisan, harus ada masalah penelitian yang harus dipecahkan. Masalah timbul karena adanya tantangan, kesangsian atau kebingungan kita terhadap suatu hal atau fenomena. Penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah itu atau setidaknya dapat menutup celah yang terjadi.¹⁸ Oleh karena itu penulis harus menemukan suatu masalah bagi penelitiannya, dan merumuskannya untuk dapat memperoleh jawaban terhadap masalah tersebut.¹⁹

Sesuai dengan latar belakang yang telah disebutkan diatas, penulis berusaha merumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan menjadi fokus kajian dalam penulisan. Tujuan dari perumusan masalah ini adalah membatasi wilayah pembahasan

¹⁸Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 133.

¹⁹*Ibid.*,

dalam penelitian menjadi lebih fokus dan tidak melebar terlalu jauh. Sehingga tujuan akhir dari penulisan akan mudah tercapai secara efektif dan terarah. Penulis memfokuskan rumusan masalah sebagai dasar penelitian sebagai berikut :

- a. Apa saja faktor perekat kerukunan multikultural di lingkungan pura Eka Dharma tersebut ?
- b. Bagaimana peran pura Eka Dharma dalam menciptakan kerukunan multikultural ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor perekat kerukunan multikultural di lingkungan pura Eka Dharma Kasihan Bantul dengan masyarakat sekitarnya.
- b. Untuk mengetahui peran pura Eka Dharma dalam menciptakan kerukunan multikultural bagi masyarakat Yogyakarta umumnya dan masyarakat sekitar khususnya.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk merumuskan berbagai alternatif dalam upaya mengatasi kerukunan multikultural, yaitu dengan cara menyumbangkan pemikiran-pemikiran dan diadakannya dialog antar umat beragama sehingga terjalinnya kerukunan multikultural di pura Eka Dharma.
- b. Guna memenuhi prasyarat akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Theologi Islam dalam ilmu Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

D. Kajian Pustaka

Pada skripsi ini kajian pustaka yang dilakukan dengan menempatkan penelitian pada beberapa tulisan baik dalam bentuk skripsi, artikel maupun buku yang berkaitan dengan tema yang diangkat penulis. Adapun skripsi dan buku yang berkaitan dengan penelitian ini adalah :

Skripsi yang *pertama* dengan judul ”*Kerukunan Antar Umat Beragama Di Kota Yogyakarta*” yang disusun oleh Isa Farhani. Secara garis besar Skripsi ini membahas tentang perlunya kesadaran bertoleransi dan kerukunan antar umat beragama dapat dilaksanakan sesuai dengan ruh syariat, dan tidak menimbulkan yang tidak dibenarkan oleh ajaran agama, maka perlu diperhatikan beberapa landasan baik yang berkaitan dengan aspek aqidah, ibadah maupun muamalah.²⁰

Skripsi yang *kedua* dengan judul ”*Kerukunan Hidup Beragama Di Lingkungan Masyarakat Sekitar Vihara Mendut Kecamatan Mugkid Magelang*”, yang disusun oleh Muhammad Taufik. Penelitian ini menggaris bawahi tentang penggambaran fakta sosial di lingkungan masyarakat Mendut yang menyangkut kehidupan beragamanya dengan metode sosiologis mengenai cara atau metode suatu lembaga keagamaan dari masing-masing agama dapat membina kerukunan hidup baik yang sifatnya kedalam maupun keluar. Adapun langkah selanjutnya dengan membentuk kerukunan hidup beragama dari masing-masing agama dengan jalan menunjukkan partisipasi-partisipasi masing-masing agama dalam menjaga ketertiban

²⁰Isa Farhani, ” *Kerukunan Antar Umat Beragama Di Kota Yogyakarta*”, Perbandingan Agama, Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga, 2002.

dan keamanan lingkungan. Selain itu juga, ditampilkan beberapa persoalan yang menyebabkan terjadinya perbedaan pandangan dalam kehidupan bermasyarakat.²¹

Dalam buku yang berjudul "*Riuh Di Beranda : Peta Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia*", yang diterbitkan oleh Bagian Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragama, Pusat Litbang Beragama, Badan Litbang Agama & Diklat Keagamaan, Departemen Agama RI. Berisikan tentang pola kerukunan hidup di Yogyakarta secara utuh dalam konteks sosio-historis perkembangan masyarakatnya, yang dikemukakan secara diskripsi analitis. Secara khusus, studi dalam buku ini dipusatkan kepada pola-pola kerukunan yang tercipta sebagai respon masyarakat umat beragama atas kebutuhannya untuk selalu hidup damai, aman dan tidak terganggu peristiwa-peristiwa konflik yang sedikit banyak akan menjadi hambatan dan merugikan kehidupan mereka. ²²

Selanjutnya dalam bentuk buku yang ditulis oleh Mursyid Ali yang berjudul : "*Studi Kasus Keagamaan dan Kerusakan Sosial : Profil Kerukunan Hidup Beragama*". Buku ini lebih menekankan akan pentingnya memperhatikan sebuah kewajiban bagi pemeluk agama untuk membina, memelihara dan menciptakan suasana keberagamaan yang harmonis, saling menghormati satu sama lain, serta mengharapkan para pemeluk agama untuk menghindari konflik, cara-cara kekerasan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul.²³

²¹Muhammad Taufik,"*Kerukunan Hidup Beragama Di Lingkungan Masyarakat Sekitar Vihara Mendut Kecamatan Mungkid Magelang*", Perbandingan Agama, Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga, 2001.

²²Zainuddin Daulay dkk, *Riuh Di Beranda : Peta Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia* (Bagian Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragama, Pusat Litbang Beragama, Badan Litbang Agama & Diklat Keagamaan, Departemen Agama RI, 2002).

²³Mursyid Ali, *Studi Kasus Keagamaan dan Kerusakan Sosial : Profil Kerukunan Hidup Beragama* (Jakarta : Balitbang Depaq, 1999-2000).

Adapun kajian dalam penelitian penulis ini menggunakan pendekatan sosiologis dengan melihat faktor perekat terciptanya kerukunan multikultural yang terjadi di lingkungan pura Eka Dharma dan juga peran serta pura dalam mewujudkan kerukunan multikultural dengan berpijak pada konsep-konsep yang ditawarkan oleh Mukti Ali serta didukung oleh teori-teori tentang kerukunan multikultural.

E. Kerangka Teori

1. Agama

Agama adalah suatu keyakinan mengenai cara hidup yang benar. Keinginan itu adalah desakan atau tuntutan alam semesta. Keinginan yang timbul menjadi inti dari agama. Agama bersifat pribadi dan universal, artinya agama merupakan pengalaman seseorang tetapi sesuai dengan kebutuhan dan keinginan umum dari hati manusia. Untuk itu harus disusun agama universal yang memenuhi segala kebutuhan dengan cara *reconception*. *Reconception* yaitu menata dan meninjau ulang agama masing-masing dalam konfrontasi dengan agama-agama lain.²⁴

Agama didefinisikan sebagai suatu sistem keyakinan yang dianut dan tindakan-tindakan yang diwujudkan oleh suatu kelompok atau masyarakat dalam menginterpretasikan dan memberi respon terhadap apa yang dirasakan dan diyakini sebagai sesuatu yang gaib dan suci. Sebagai suatu sistem keyakinan, agama berbeda dengan sistem-sistem keyakinan atau isme-isme lainnya, karena landasan keyakinan keagamaan adalah pada konsep suci (*sacred*) yang dibedakan dari, atau dipertentangkan dengan yang duniawi (*profance*), dan pada yang gaib atau supranatural (*supernatural*) yang menjadi lawan dari hukum-hukum alamiah

²⁴ Mursyid Ali (ed), *Studi Agama-agama di Perguruan Tinggi Bingkai Sosio-Kultural Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama di Indonesia* (Jakarta : Departemen Agama RI, Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Proyek Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama, 1998/1999), hlm.16-17.

(*natural*).²⁵ Agama adalah seperangkat doktrin, kepercayaan, atau sekumpulan norma dan ajaran Tuhan yang bersifat universal dan mutlak kebenarannya.

Adapun keberagaman, adalah penyikapan atau pemahaman para penganut agama terhadap doktrin, kepercayaan, atau ajaran-ajaran Tuhan itu, yang tentu saja menjadi relative, dan sudah pasti kebenarannya menjadi bernilai relative.²⁶

2. Multikultural

Kata kebudayaan berasal dari kata sansekerta buddayah, yaitu bentuk jamak dari buddhi yang berarti budi atau akal. Dengan demikian kebudayaan dapat diartikan yaitu hal-hal yang bersangkutan dengan akal. Karena itu, mereka membedakan budaya dari kebudayaan. Demikianlah budaya adalah daya dari budi yang berupa cipta, rasa, dan karsa. Sedangkan kebudayaan adalah hasil dari cipta, rasa dan karsa itu.²⁷ Menurut ilmu antropologi, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar.²⁸

Dalam kamus sosiologi yang disusun oleh Soerjono Soekanto, multikultural berkenaan dengan lebih dari dua kebudayaan.²⁹ Jenis kebudayaan yang dimaksud dalam kajian ini adalah kebudayaan kemasyarakatan. Kebudayaan kemasyarakatan adalah kebudayaan yang memberikan kepada anggotanya berbagai cara hidup yang penuh arti dalam segala kegiatan manusia, termasuk kehidupan sosial, pendidikan, agama, dan ekonomi yang mencakup bidang publik maupun pribadi. Kebudayaan-

²⁵J Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (ed), *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan*. Edisi Kedua(Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 249.

²⁶Adeng Muchtar Ghazali, *Ilmu Studi Agama* (Bandung: Pustaka Setia, 2005), hlm. 20.

²⁷Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta : Aksara baru, 1980), hlm 195.

²⁸*Ibid.*,hlm. 193.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, cet 3 (Jakarta : Rajawali Pers, 1993), hlm.324.

kebudayaan tersebut terkonsentrasi secara teritorial, berdasarkan bahasa yang sama.³⁰ Keragaman di dalam suatu bangsa atau negara timbul oleh beberapa sebab. Sebab pertama akibat dari kehadiran bersama lebih dari satu bangsa dari negara tertentu ke wilayah tertentu.³¹ Bangsa yang masuk ke wilayah tertentu tersebut membawa kebudayaan sendiri, sehingga menambah jumlah budaya bagi wilayah baru yang dihuni tersebut. Kedua, timbulnya keragaman budaya oleh imigrasi perorangan maupun keluarga. Setelah datang, mereka kemudian berintegrasi dan melebur bersama dengan masyarakat. Namun bila mereka membuat suatu perkumpulan sendiri yang lepas dari suatu teritorial tertentu, para imigran ini disebut kelompok etnis.³²

Secara etimologi, multikulturalisme³³ berarti dibentuk dari tiga kata, yaitu kata multi (berarti banyak)³⁴, kultural (kebudayaan) dan isme (paham/ideologi).³⁵ Dengan demikian maka multikulturalisme berarti ideologi/paham tentang banyak kebudayaan. Multikulturalisme berarti pengakuan atas beberapa kultur yang berbeda serta didalamnya terkandung semangat memelihara perbedaan atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, agama dan lain-lain.³⁶ selanjutnya dalam pengertian Suparlan, multikulturalisme adalah sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan, baik secara individual maupun secara kebudayaan.³⁷ Oleh karena menurutnya, multikulturalisme tidak bisa disamakan dengan konsep

³⁰ Willy Kimlicha, *Kewargaan Multikultural* (Jakarta : LP3S, 2002), hlm.114

³¹ *Ibid.*, hlm 14.

³² *Ibid.*

³³ Istilah multikulturalisme terkadang dipakai untuk menggambarkan sebuah kondisi yang didalamnya terdapat keberanekaragaman budaya. Kadang juga tidak hanya untuk menggambarkan keadaan sebuah komunitas (masyarakat maupun bangsa) yang beraneka ragam, tapi merupakan sebuah sikap mengakui, menghargai, menghormati keadaan budaya yang bersifat beragam baik dari pemerintah yang berkuasa maupun dari masyarakat sendiri. Namun dalam tulisan ini sendiri multikulturalisme diartikan sebagai keberagaman budaya.

³⁴ Ahmad Maulana dkk, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap* (Yogyakarta : Absolut, 2004), hlm.255.

³⁵ Choirul Mahfudz, *Pendidikan Multikultural*, cet ! (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006), hlm.75.

³⁶ Sulistyowati Irianto, "Multikulturalisme dalam Perspektif Hukum : Tragedi Perempuan Tionghoa", *Jurnal Masyarakat Indonesia Majalah Ilmu-ilmu Sosial LIPPI*, Jilid XXIX, No.I, (2003), hlm.60

³⁷ *Ibid.*, hlm.2.

keanekaragaman secara suku bangsa (etnik). Sebab multikulturalisme menekankan keanekaragaman budaya dalam kesederajatan.³⁸

Ditekankan kembali oleh Koentjaraningrat bahwa setiap unsur budaya (seperti bahasa, organisasi sosial, teknologi dan peralatan, ilmu pengetahuan, religi dan kesenian) terdiri dari ide atau gagasan, tindakan, dan benda hasil tindakan tersebut.³⁹

Menurut Hilman Hadikusuma, agama adalah ajaran yang diturunkan Tuhan untuk petunjuk bagi umat manusia dalam menjalani kehidupannya. Dia membedakan antara agama budaya dengan kebudayaan agama. Agama budaya adalah petunjuk hidup yang berasal dari pemikiran dan kebudayaan manusia. Sedangkan kebudayaan agama adalah hasil kreasi manusia beragama seperti tafsir Alquran, kaligrafi dan lainnya.⁴⁰

Sejak lebih dari setengah abad silam telah menyatakan kemerdekaannya, Indonesia telah terdiri dari berbagai macam etnis, budaya, agama, bahasa, adat istiadat sehingga bangsa Indonesia dapat disebut sebagai masyarakat multikultural. Sebagai suatu realitas sosial masyarakat yang sulit dipungkiri dan diingkari, multikulturalisme merupakan salah satu realitas utama yang dialami masyarakat Indonesia, di masa silam, masa kini, dan masa yang akan datang.⁴¹

Multikulturalisme dipahami sebagai pengakuan bahwa sebuah negara atau masyarakat adalah beragam dan majemuk. Atau dapat dikatakan bahwa multikultural adalah suatu kepercayaan kepada normalitas dan penerimaan keragaman. Sejatinya tidak ada suatu negara yang hanya satu kebudayaan nasional tunggal.

³⁸ Parsudi Suparlan, *Kesetaraan Warga dan Hak Budaya Komuniti dalam Masyarakat Majemuk Indonesia I*, tulisan ini merupakan Keynote Address yang disampaikan dalam Sesi Pleno Simposium Internasional Jurnal Antropologi Indonesia ke-2 : “Globalisasi dan Kebudayaan Lokal : Suatu Dialektika Indonesia Baru”, kampus Universitas Andalas, Padang, 18-21 Juli 2001.

³⁹Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta : Bina Cipta, 2000), hlm. 179-202.

⁴⁰Hilman Hadikusuma, *Antropologi Agama*. Bagian I dan II (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993), hlm 15-28.

⁴¹ *Ibid*

Multikulturalisme disini, dipandang sebagai landasan budaya (cultural basis) tidak hanya bagi kewargaan dan kewarganegaraan, tetapi juga bagi pendidikan.⁴²

Multikulturalisme adalah istilah yang samar, ambivalen, debatable. Makna, respon dan kritik atas multikulturalisme adalah tergantung pada perspektif individu yang memahaminya. Secara implisit, multikulturalisme ini hanya dilihat sebagai ideologi daripada kenyataan pluralitas kultural yang hidup dalam masyarakat, sistem ekonomi, pemerintahan, intelektual, sistem keagamaan atau bahkan kebudayaan. Untuk memahami multikulturalisme dibutuhkan alternatif pemaknaan tentang ideologi. Adapun ideologi ini sendiri adalah suatu sistem kepercayaan yang komprehensif yang diikuti oleh berbagai kelompok sosial, dan dengan berbagai macam alasan.

Masyarakat multikultural adalah sebuah fakta, fakta yang menantang presuposisi dan aspirasi kita, bahwa semakin bercampur baurnya penduduk seluruh dunia memberikan tekanan pada pemerintahan, sistem pendidikan, ekonomi serta agama. Interaksi dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda dengan kekhasan masing-masing individu, namun dispersi dalam kebudayaan, sumberdaya, harapan-harapan yang akhirnya melahirkan ketidakpuasan dan konflik sosial. Dan ketika perbedaan nasionalitas, etnisitas dan ras muncul bersamaan dengan perbedaan agama, maka potensi untuk berbenturan akan semakin besar. Jadi arti penting dari multikultural ini adalah kumpulan orang-orang dari berbagai kebudayaan yang beragam secara permanen hidup berdampingan antara satu dengan lainnya.⁴³

⁴² Zakiyuddin Baidhawiy, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural* (Jakarta : Erlangga, 2005), hlm. Vii.

⁴³ Ibid., hlm. 2-5.

3. Kerukunan

Tri Kerukunan Sebagai Wadah. Tri kerukunan itu adalah: kerukunan intern umat beragama; kerukunan antar sesama umat beragama; kerukunan antara umat beragama dengan Pemerintah

Adapun konsep tentang kerukunan adalah sebagai berikut :

1. Kerukunan menurut agama Hindu

Umat Hindu menurut pengertian Weda pada hakikatnya merupakan bagian dari manusia lainnya, tak terpisahkan dari seluruh ciptaan Tuhan (Sang Hyang Widi Wasa), penguasa dan penakdir segala ciptaan-Nya di alam semesta ini. Manusia Hindu tidak dapat memisahkan dirinya untuk sebuah perbedaan, karena ia berasal dari yang satu, serta pada akhirnya akan kembali kepada yang satu jua.⁴⁴

Demikianlah di dalam pustaka suci Weda dinyatakan sebuah kalimat: "TAT WAM ASI" yang bermakna: "Itu adalah Engkau, Dia adalah Kamu, Aku adalah Dia, Engkau adalah Aku, dan seterusnya..." bahwa setiap manusia adalah saudara dari manusia lainnya dan teman dari insan ciptaan-Nya. Tat Wam Asi ini menjadi landasan etik dan moral bagi umat Hindu di dalam menjalani hidupnya sehingga ia dapat melaksanakan kewajibannya di dunia ini dengan harmonis. Berpedoman pada filsafat Tat Wam Asi maka umat Hindu sebagai bagian dari warga Bangsa Indonesia wajib mengamalkan ajaran agamanya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Umat Hindu harus mengabdikan bagi kepentingan bangsa dan negara, serta demi keluhuran harkat dan martabat umat manusia di dunia ini. Apa saja yang menjadi masalah bangsa kita adalah masalah yang harus dihadapi bersama oleh umat Hindu, dengan bekerja sama bahu membahu dalam suasana kerukunan sejati dengan sesama

⁴⁴ I Wayan Tirta, "Perspektif Kerukunan Hidup Umat Beragama Menurut Hindu", LPKUB Indonesia perwakilan Medan, dilihat dalam <http://www.Hindu-Indonesia.com>, diakses tanggal 5 September 2008.

umat beragama dan sesama warga negara Indonesia lainnya. Umat Hindu tidak boleh melepaskan keterkaitan dirinya, baik secara pribadi maupun kelompok sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia, karena agama Hindu mengajarkan kewajiban moral pengabdian terhadap Negara yang disebut "Dharma Negara" dan kewajiban moral mengamalkan ajaran agamanya disebut "Dharma Agama".

Sebagai warga negara, umat Hindu harus tunduk dan patuh kepada konstitusi serta berupaya membudayakan nilai-nilai Pancasila pandangan hidup bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari secara nyata. Oleh karena itu dalam rangka sosialisasi dan inkulturasi nilai-nilai luhur agama dalam proses pembangunan nasional maka umat Hindu harus mengamalkan ajaran agamanya secara benar dengan mengupayakan revitalisasi terhadap mantra-mantra/ayat-ayat suci Weda sehingga mampu memberikan kontribusinya terhadap kelancaran pelaksanaan pembangunan nasional menuju masyarakat madani.

Dengan demikian maka umat Hindu akan dapat berjalan seiring, selaras, serasi dan seimbang dengan umat lain karena memiliki dasar pandangan yang sama di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam pada itu maka suasana kebersamaan dan kerukunan umat beragama, maupun sinergi suku, ras, antar golongan yang penuh perdamaian dan didorong oleh rasa kesadaran nasional niscaya akan terwujud dengan harmonis. Kesadaran nasional sebagai esensi bangsa, yang memiliki kehendak untuk bersatu harus mempunyai sikap mental, jiwa dan semangat kebangsaan (nasionalisme) sebagaimana disitir oleh Hans Kung "sebagai tekad suatu masyarakat untuk secara sadar membangun masa depan bersama, terlepas dari perbedaan ras, suku ataupun agama warganya".

Svami Chinmayananda dalam bukunya "The Art of Living" menyatakan bahwa sekelompok manusia yang tinggal di suatu bagian geografis tertentu tidak

dapat disebut bangsa, tetapi hanya merupakan sekelompok manusia. Apabila kelompok semacam itu hidup bersama dalam kerukunan dan berupaya untuk mencapai suatu tujuan yang sama, barulah ia dapat disebut "bangsa". Kualitas suatu bangsa sangat bergantung pada kualitas individu warga negaranya yang memiliki rasa persaudaraan, kasih sayang dan pengertian yang integratif.

Bagi kita bangsa Indonesia cita-cita masa depan yang akan dibangun adalah suatu masyarakat madani yang adil dan makmur materiil dan spiritual dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dalam suasana peri kehidupan yang aman, tentram, tertib dan dinamis, serta dalam suasana pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai. Hal ini sejalan dengan tujuan agama Hindu yaitu "Moksartham Jagadhitaya ca iti Dharmah".

Sehubungan dengan itu, maka filsafat "*Tat Wam Asi, Dharma Agama, Dharma Negara*" yang mewujud ke dalam pengamalan ajaran Tri Hita Karana adalah merupakan konsep pemikiran Hindu yang menjadi dasar etik dan moral dalam menjalankan kewajiban hidup baik sebagai manusia pribadi, sebagai warga negara maupun sebagai umat beragama yang "*dharmika*" yaitu umat yang sadar akan hak dan kewajibannya.

Konsep pemikiran Hindu dalam rangka mendukung terwujudnya kerukunan dan perdamaian dalam kehidupan bernegara kesatuan harus dilandasi etik dan moral ajaran Weda yang diaktualisasikan dalam sikap sebagai berikut : Menyadari dirinya sebagai sahabat dari sesama umat manusia, baik intern umat Hindu, antar SARA, maupun dengan pemerintah. Mereka juga sebagai teman dari semua ciptaan Tuhan, karena berasal dari pencipta yang sama serta diisi dan digerakkan oleh sumber hidup yang sama.

Sutasoma, dasar teologis kerukunan dan langkah-langkah mewujudkan kerukunan umat beragama dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa

2. Kerukunan menurut pemerintah

Demikian juga apa yang diamanatkan Undang-Undang dasar negara kita di dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 yang antara lain disebutkan tentang kebijakan pembangunan agama meliputi antara lain ; memantapkan fungsi, peran dan kedudukan agama sebagai landasan moral, spritual dan etika dalam penyelenggaraan Negara serta mengupayakan agar segala peraturan perundang undangan tidak bertentangan dengan moral agama-agama. Meningkatkan dan memantapkan kerukunan hidup antar umat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat kemajemukan melalui dialog antar umat beragama dan pelaksanaan pendidikan agama yang baik.

3. Kerukunan menurut K.H.Moch. Dachlan

Terminologi kerukunan yang pertama kali diangkat oleh .H.Moh.Dachlan, menteri agama RI 1968-1971 adalah kata kunci yang amat penting dalam konteks kemajemukan agama di Indonesia. Terminologi itu adalah ruang, kerangka, bingkai yang di dalamnya agama-agama di Indonesia bisa bertemu, berinteraksi dan memberi kontribusi bagi masyarakat dan bangsanya. Kerukunan sebab itu tidak boleh berhenti hanya sebagai istilah, jargon dan atau diperkecil maknanya menjadi sesuatu yang artificial, sesuatu yang verbal dan tidak mewujudkan nyata.

Kegigihan dan kerja keras Menteri Agama untuk memantapkan kerukunan antarumat beragama di Indonesia perlu diacungi jempol. Namun ide untuk menyusun suatu UU Kerukunan memerlukan pengkajian lebih dalam karena beberapa hal:

1. Kerukunan sebagai aktualisasi nilai-nilai agama, sikap hidup dan implementasi kultural, amat kaku jika pelaksanaannya mesti diatur oleh sebuah undang-undang. Sementara itu ambivalensi, dan inkonsistensi dalam pelaksanaan sebuah ketentuan perundangan yang acapkali terjadi, justru tidak akan menolong upaya perwujudan kerukunan itu sendiri.
 2. UUD 1945, Pancasila, GBHN, P4, telah memberikan arahan yang amat jelas, mendasar dan normatif tentang bagaimana masyarakat majemuk Indonesia mewujudkan kerukunan. Jika komitmen persatuan dan kesatuan itu menjadi nada dasar dalam hidup membangsa dan seluruh ketentuan perundangan itu diwujudkan secara konsisten, kerukunan itu akan dapat terwujud dengan baik.
4. Kerukunan menurut Mukti Ali

Mukti Ali yang pada saat itu menjabat sebagai menteri agama menggantikan K.H. Mohammad Dachlan (1968-1971), dimaksudkan sebagai langkah Orde Baru Untuk mengadakan restrukturisasi dan reorientasi kebijakan Orde Baru di departemen Agama tersebut.

Nama besar Mukti Ali dimulai ketika munculnya Jurusan Perbandingan Agama pada tahun 1960-an yang ia prakarsai. Sehingga ia dijuluki sebagai "Bapak" perbandingan agama, dibukanya jurusan itu di IAIN merupakan "Sebuah Gerakan Pembaharuan Wacana" oleh Mukti Ali sebagai batu bata bagi tumbuhnya minat dialog antar umat beragama di Indonesia. Kompetensi akademik dan ilmiah Mukti Ali dalam mencanangkan kerukunan antara/Intern umat beragama melalui forum dialog antar /intern umat beragama tidak hanya terletak pada gelar Ph.D, yang dia raih dari McGill University Canada, tetapi melalui proses panjang internalisasi selama merintis dan mengajar kajian ilmu Perbandingan Agama di ADIA dan juga IAIN sejak tahun 1950-

an. Kebijakan kebijakan yang telah ditelorkannya adalah untuk melakukan pembaharuan dan modernisasi dalam bidang politik dan keagamaan.

Adapun landasan teoritik kerukunan yang dikemukakan Mukti Ali adalah dengan memajukan konsep *agree in disagreement*; karena masalah agama adalah ” khas” dan karenanya, tidak dapat diperjanjikan. Akhirnya di tangan Mukti Ali, konsep ”Kerukunan Hidup Umat Beragama” yang muncul kali pertama dari K.H. Mohammad Dachlan menjadi regulasi yang jelas dan terarah.⁴⁵

Konsep *Agree in disagreement* ini mengajarkan bahwa setiap orang percaya bahwa agama yang dianutnya adalah yang paling baik dan benar. Persamaan antara agama-agama itu harus diketengahkan sementara perbedaan harus diakui, dihargai, dan dihormati. Konsep ini sama dengan konsep hubungan pluralis dari Bishop. Para pendukung konsep ini adalah mereka yang tidak membayangkan akan lahirnya sebuah agama yang lebih universal, tetapi berharap agar agama-agama besar dapat mempertahankan jati diri masing-masing walaupun mereka saling berharap bahwa hubungan antar mereka akan membuahkan persaudaraan dan saling bermurah hati.⁴⁶

Ada tiga program utama yang dijajal Mukti Ali untuk mencairkan hubungan antar penganut agama di Indonesia. *Pertama*, dialog antar tokoh agama di seluruh Indonesia. *Kedua*, mengadakan penelitian tentang masyarakat Indonesia terutama meneliti komunitas agama dengan melibatkan para peneliti dan mahasiswa, seperti meneliti masyarakat NU, Muhammadiyah, Ahmadiyah, masyarakat Katholik, Protestan, Buddhis, Hindu dan sebagainya. *Ketiga*, mengadakan pertemuan antara mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi terutama yang berbasis agama guna

⁴⁵Ali Munhanif, ” *Prof. Dr. H. A. Mukti Ali : Modernisasi politik-keagamaan Orde Baru*”, hlm 192.

⁴⁶Mursyid Ali (ed), *Studi Agama-agama di Perguruan Tinggi Bingkai Sosio-Kultural...*, hlm.20.

membangun saling pengertian antar mereka, saling kenal secara pribadi dan dalam rentang waktu satu minggu atau lebih lamanya.⁴⁷

F. Metodologi Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui lebih jauh tentang Pola Pengembangan Kerukunan Berwawasan Multikultural di Pura Eka Dharma Kasihan Bantul. Untuk mendapatkan data yang berhubungan dari permasalahan yang dirumuskan, mempermudah pelaksanaan penelitian serta mencapai tujuan yang ditentukan, maka penyusun menggunakan metode observasi sesuai dengan masalah yang dihadapi.

1. Bentuk Penelitian

Adapun bentuk penelitian yang sesuai dengan gambaran latar belakang masalah diatas adalah observasi. Observasi yaitu suatu studi yang disengaja dan sistematis tentang keadaan atau fenomena sosial dan gejala pasti, dengan jalan mengamati dan mencatat.⁴⁸

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data digunakan tiga teknik yaitu :

a. Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengamatan yang khusus dengan pencatatan yang sistematis ditujukan pada satu atau beberapa fase masalah dalam rangka penelitian dengan maksud untuk mendapatkan data yang diperlukan guna

⁴⁷ Icrp@cbn.net.id

⁴⁸Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Sosial* (Jakarta : Bumi Aksara, 1995), hlm. 63.

memecahkan persoalan yang dihadapi.⁴⁹ Teknik observasi ini digunakan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan obyek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan melalui percakapan dan berhadapan langsung dengan orang yang dapat memberi keterangan atau informasi kepada peneliti.⁵⁰ Metode wawancara ini sama penelitiannya dengan metode interview, karena mendapatkan informasi langsung dari narasumbernya.

Adapun dalam memperoleh data yang diinginkan, penulis mewawancarai beberapa tokoh masyarakat dan tokoh agama Hindu sendiri antara lain : Bapak Mulyo Sumarto selaku sesepuh pura yang mengetahui seluk beluk serta awal mula berdiri dan sejarah perkembangan pura Eka Dharma ini, Bapak Ali Gono selaku ketua PHDI cabang kecamatan Kasihan, Bapak Subari selaku staf KesRa desa Tamantirto, juga segenap pengurus pura Eka Dharma, serta masyarakat sekitar.

c. Dokumentasi

Teknik ini dirasa sesuai dengan obyek penelitian kali ini, dimana teknik pengumpulan data ini diperoleh melalui buku-buku, arsip, teori atau hukum yang berhubungan dengan penelitian yang digunakan sebagai kerangka teoritik.

3. Pendekatan

Dalam hal ini digunakan pendekatan sosiologis, karena dirasa sesuai dengan kajian yang menjadi obyek penelitian. Dimana pendekatan sosiologis adalah suatu pendekatan yang dipakai untuk menyelidiki bagaimana tata cara masyarakat, kebudayaan dan pribadi-pribadi mempengaruhi agama, sebagaimana agama itu

⁴⁹Sapari Imam Asy' Arie, *Metode Penelitian Sosial* (Surabaya : Usaha Nasional, 1981), hlm. 69.

⁵⁰Mardalis, *op. cit.*, hlm. 64.

sendiri mempengaruhi mereka serta interaksi langsung dan tidak langsung antara sistem-sistem religius dan masyarakat itu sendiri.⁵¹

4. Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam menganalisis data penelitian ini digunakan deskriptif analisis artinya setelah dianalisis kemudian dituangkan dalam bentuk pemaparan yang sesuai dengan keadaan obyek yang sebenarnya.

G. Sistematika Pembahasan

Seluruh pembahasan dalam skripsi ini akan dituangkan dalam bab per bab sesuai dengan pokok permasalahan masing-masing, sebagai tahapan untuk menjawab rumusan masalah diatas.

Bab I membahas mengenai pendahuluan, yang memuat Latar Belakang masalah berisi tentang awal timbulnya permasalahan yang terjadi di lapangan, yang akan penulis bahas dalam bab selanjutnya, Rumusan Masalah berisi tentang perumusan masalah yang akan diangkat, tujuan dan kegunaan penelitian digunakan untuk melihat sejauh mana arah penelitian yang dilakukan serta dapatkah berguna bagi diri sendiri tentunya juga bagi khalayak ramai, kajian pustaka digunakan untuk membedakan antara penelitian yang sudah-sudah dengan penelitian penulis ini, kerangka teori memuat tentang teori-teori yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, metode penelitian memuat tentang bentuk penelitian yaitu menggunakan teknik pengumpulan data, pendekatan dan analisis, dan sistematika pembahasan berisi tentang pembahasan-pembahasan yang tersusun secara urut. Hal ini berguna untuk mempermudah para pembaca dalam memahami isi dari apa yang penulis paparkan di bab-bab berikutnya.

⁵¹Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi penelitian Sosial – Agama* (Bandung : PT Remaja Rosda karya, 2003), hlm. 61.

Bab II. Pembahasan diawali dengan gambaran umum tentang Pura Eka Dharma Di Kasihan Bantul Yogyakarta, terdiri dari letak geografisnya, sejarah berdirinya serta sejarah perkembangannya.

Bab III. Pola pengembangan kerukunan berwawasan multikultural. Pada bab ini dibahas tentang deskripsi pola-pola pengembangan kerukunan yang digunakan dan bagaimana hubungannya dengan keberagaman dan kemajemukan yang ada di Indonesia.

Bab IV. Bab ini berisi analisis terhadap pengembangan kerukunan berwawasan multikultural di Pura ini dan bagaimana Implikasinya serta Sumbangsihnya bagi masyarakat.

Bab V. penutup. Bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan dari uraian bab-bab terdahulu yang merupakan jawaban dari rumusan masalah, juga berisi tentang saran-saran yang diharapkan mampu membangun kehidupan beragama kearah yang lebih baik.

BAB II

GAMBARAN UMUM PURA EKA DHARMA

A. Letak Geografis

Penelitian ini memfokuskan wilayah kajian pada masyarakat sekitar pura Eka Dharma, yang merupakan penggambaran masyarakat Yogyakarta umumnya yang majemuk dengan keberanekaragaman budaya yang diusung. Pura Eka Dharma merupakan salah satu dari pura yang ada di Yogyakarta. Wilayah pura ini terletak 6 Km sebelah selatan kota Yogyakarta, dengan luas tanah kurang lebih 400 m² tepatnya berada di Gonjen Kasihan Bantul.

Adapun batas wilayahnya dapat dideskripsikan sebagai berikut :

1. Sebelah barat berbatasan dengan Sumberan
2. Sebelah timur berbatasan dengan Sungai Ledhok
3. Sebelah utara berbatasan dengan Ring Road Selatan
4. Sebelah selatan berbatasan dengan Kembaran

Diantara Pura-pura yang lain, pura Eka Dharma ini adalah pura yang pertama kali berdiri di Yogyakarta. Didirikannya pura ini atas inisiatif salah seorang tentara Angkatan Darat (AD), yang bernama Abdul Basir (alm) pada tahun 1970-an. Beliau merupakan pendiri sekaligus tokoh dalam agama Hindu.¹

B. Sejarah Berdiri dan Sejarah Perkembangan Pura

Agama Hindu masuk ke-Jawa kira-kira abad ke-3 dan ke-4 Masehi dibawa oleh para pedagang dari India Selatan. Setelah para pedagang itu kuat dalam

¹ Wawancara dengan Bapak Ali Gono selaku ketua PHDI cab Kecamatan, tanggal 26 September 2008.

memperkokoh perdagangannya kemudian mulai masuk pada sistem kekuasaan Jawa pada waktu itu. Selanjutnya penyebaran unsur Hindu ini diteruskan oleh para Brahman, salah satunya epos Ramayana dan Mahabarata. Kemudian kepercayaan ini mulai berpadu dengan kebudayaan dan kepercayaan masyarakat Jawa yang pada waktu itu sangat kental pada kepercayaan Animisme dan Dinamisme yang menjadi perpaduan yang sinkretis. Dalam kebudayaan Jawa terdapat tiga tipe kebudayaan yang merupakan inti dari struktur sosial dan keagamaannya yaitu abangan, santri dan priyayi.² Diantara ketiganya diatas, priyayilah yang aktif menyebarkan unsur-unsur Hindu di Jawa. Golongan priyayi adalah golongan cendikiawan Jawa, dimana golongan ini menjelma menjadi kaum bangsawan, maka di tangan mereka unsur-unsur Hinduisme mengalami Jawanisasi, bukan sebaliknya. Sehingga wajar apabila agama dan kebudayaan Hindu tidak diterima secara lengkap dan utuh.³ Pengaruh masuknya kebudayaan Hindu ini lebih bersifat ekspansif, sedang kebudayaan Jawa yang menerima pengaruhnya dan menyerap unsur-unsur Hinduisme.

Masyarakat Jawa merupakan sebuah masyarakat yang memiliki susunan kebudayaan secara teratur, yang tidak terlepas dari keyakinan dan budaya-budaya tertentu yang mendasari dan melatarbelakanginya. Menurut Suseno, pola pergaulan masyarakat Jawa ditentukan oleh prinsip-prinsip kerukunan dan saling menghormati dan juga kedua prinsip tersebut merupakan kerangka normatif yang menentukan bentuk-bentuk konkrit dari semua interaksi atau hubungan masyarakat.⁴

Koentjaraningrat mendefinisikan agama yang dianut oleh masyarakat Jawa atau agama Jawa, yaitu suatu bentuk agama orang Jawa yang merupakan suatu

² Clifford Geertz, *Abangan Santri Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, Penerjemah Aswab Mahasin, (Jakarta : Pustaka Jaya, 1983), hlm.6.

³ Simuh, *Sufisme Jawa*, (Jakarta : Yayasan Bentang Buana, 1999), hlm.116.

⁴ Frans Magnis-Suseno SJ, *Etika Jawa Sebuah Analisa Falsafi Tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa*, (Jakarta : PT Gramedia, 1988), hlm,60.

kompleks keyakinan dan konsep-konsep Hindu-Buddha yang cenderung menjadi satu, yang diakui sebagian pengikutnya sebagai agama Islam Jawa.⁵

Sistem kepercayaan dan kebudayaan Jawa sebelum masuknya agama Hindu belum dapat dikenal secara pasti, akan tetapi pada dasarnya masyarakat Jawa adalah masyarakat yang sangat sederhana. Ini terlihat pada sistem religi Animisme dan Dinamisme yang mewarnai segala aktifitas sekaligus menjadi inti kebudayaan dalam masyarakat.⁶

Dalam hal ini J.W.M. Bakker menyatakan :

Agama Hindu murni tidak pernah menjadi milik bangsa Indonesia, tapi hanya unsur-unsurnya saja, bukan saja dari Mahabarata dan Ramayana menjadi populer dan disesuaikan dengan pandangan setempat. Hinduisme tenggelam dalam lautan pemikiran asli, hanya dimanfaatkan untuk memantapkan pandangan Indonesia dimana waktu itu masih samar-samar.⁷

Agama Hindu dalam bahasa sanskerta disebut sebagai *Sanatana Dharma* yang berarti "kebenaran abadi"⁸ dan Vaidika Dharma (pengetahuan kebenaran) adalah sebuah agama yang berasal dari anak benua India. Agama ini merupakan lanjutan dari agama Weda (Brahmanisme) yang merupakan kepercayaan bangsa Indi-Iran (Arya). Agama ini diperkirakan muncul antara tahun 3102 SM sampai 1300SM dan merupakan agama tertua di dunia yang masih bertahan hingga kini.⁹ Agama ini merupakan agama ketiga terbesar di dunia setelah agama Kristen dan Islam dengan jumlah umat sebanyak hampir 1 milyar jiwa.¹⁰

Dalam bahasa Persia, kata Hindu berakar dari kata Sindhu (bahasa Sanskerta).

Dalam Regweda, bangsa Arya menyebut wilayah mereka sebagai Sapta Sindhu

⁵ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1994), hlm.312.

⁶ Simuh., hlm.110.

⁷ Sumidi Adi Sasmita, *Sekitar Pudjangga Ranggawarsita*, (Yogyakarta : Jajasan Sostro Kartono, 1971), hlm.10.

⁸ Hindu juga dikenal dengan Hindu Dharma atau Vaidika Dharma dalam beberapa bahasa India modern, seperti bahasa Hindi, bahasa Bengalidan beberapa turunan bahasa Indo-Arya, juga beberapa dialek bahasa Dravida seperti bahasa Tamil dan bahasa Kanada.

⁹ David Frawley, "*Hinduism and Clash of Civilization*" (India),-, 2001).

¹⁰ *Major Religions of The World Ranked by Number of Adherents*, (data 2005)

(wilayah dengan tujuh sungai di barat daya anak benua India, yang salah satu sungai tersebut bernama sungai Indus). Hal ini mendekati dengan kata Hapta-Hindu yang termuat dalam Zend Avesta, sastra suci dari kaum Zoroaster di Iran. Pada awalnya kata Hindu merujuk pada masyarakat yang hidup di wilayah sungai Sindhu.¹¹

Tempat suci pura, pada umumnya dibangun dengan berpedoman pada konsep Tri Mandala yaitu Utama Mandala, Madhyama Mandala dan Kanistama Mandala, telah mengarahkan pikiran dan tindakan warga Hindu untuk memfungsikan tempat suci pura untuk aktivitas-aktivitas ritus-spiritual, yaitu komunikasi dan hubungan vertikal warga Hindu dengan Brahman/Hyang Widhi/Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus aktivitas-aktivitas ritus sosial, yaitu komunikasi dan hubungan horisontal antar seswamka warga Hindu di tempat suci pura masih sangat berfokus dan didominasi oleh aktivitas ritus spiritual (vertikal) dan tempat suci pura kurang difungsikan sebagai tempat untuk melaksanakan aktivitas ritus sosial (horisontal).¹²

Konsesi ideal Tri Mandala tempat suci pura pada faktanya belum dilaksanakan secara optimal oleh warga Hindu. Kelemahan dalam mengimplementasikan konsep ideal ini berdampak pada sikap mental warga Hindu yang cenderung berorientasi pada kehidupan rohanisemata dan kurang memperdulikan kehidupan duniawi. Dampak lanjutannya, sebagian besar warga Hindu menjadi cenderung hanya memikirkan dirinya sendiri dan tenggelam dalam rutinitas kegiatan ritual atau upacara yang berdimensi vertikal, pada saat yang sama kurang peka dan peduli pada kehidupan sosial di sekelilingnya. Hal ini dapat menimbulkan citra bahwa Hindu adalah ajaran agama yang fatalis (tidak mengurus aspek duniawi), utopis (penuh angan-angan semu) dan dehumanis (tidak manusiawi). Kondisi ini tidak dapat

¹¹ Wawancara dengan Bapak Ali Gono selaku ketua PHDI cab Kecamatan, tanggal 26 September 2008.

¹² Wawancara dengan Bapak Wasi selaku pengurus pura sekaligus mengurus upacara peribadatan, tanggal 20 Oktober 2008.

dibiarkan berjalan terus. Warga Hindu di pura Eka Dharma harus didorong dan diarahkajn agar secara mandiri bertanggung jawab pada pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia Hindu secara utuh dan menyeluruh baik rohani dan jasmani.¹³

Guna mempercepat proses penyeimbangan fokus pembinaan dan pengembangan aspek kehidupan rohani dan kehidupan duniawi tersebut, warga Hindu sewajarnya mendapatkan inspirasi, motivasi, arahan, bimbingan dan panduan nyata tentang optimalisasi fungsi tempat suci pura. Parisadha sebagai Majelis Tinggi umat Hindu di Indonesia sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya berkewajiban mengemban tugas ini. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, sebagai swadharma pengurus dalam menjalankan yadnya dan bahktinya, disusunlah panduan dasar optimalisasi fungsi tempat suci pura ini.¹⁴

Pura Eka Dharma berdiri pada tahun 1970-an, adapun pendirinya sekaligus merupakan tokoh dalam agama Hindu yaitu Abdul Basir (alm), pada saat itu adalah seorang TNI AD. Nama pura Eka Dharma berasal dari dua kata, yaitu eka dan dharma yang berarti satu kebenaran. Atau dapat pula dikatakan bahwamaksud pemberian nama pura Eka Dharma ini, adalah satu kebenaran yang berasal dar Sang Hyang Widhi Wasa yang dapat menjadi tuntunan dan petunjuk bagi umat Hindu.

Berdirinya pura pada saat itu, atas wangsit yang didapat olehb Abdul Basir (alm) yang pada saat itu sedang bersemedi atau bertapa di Gunung Sempu. Beliau bersama dengan adiknya yakni Bapak Mulyo Sumarto serta dengan rekan-rekan se-dharma ini, kemudian merembukkan maksud dan tujuan mereka tersebut. Kemudian barulah pada tahun 1974 pura Eka Dharma resmi didirikan.¹⁵

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Mulyo Sumarto selaku sesepuh pura. Tanggal 17 Oktober 2008.

Pada awal berdirinya, pura ini menyungung kurang lebih 50 KK, sedang sekarang menyungung kurang lebih 110 KK. Kondisi pura pada saat itu belum seperti sekarang, akan tetapi tidak mempengaruhi jalannya peribadatan yang ada disana. Letak pura yang sangat berdekatan dengan pemukiman warga tidak mempengaruhi jalannya praktek-praktek keagamaan yang diadakan di pura maupun yang diadakan warga sekitar. Jelas sekali terlihat perbedaan antara pura Eka Dharma yang bertempat di bantul ini dengan pura yang ada di bali umumnya dikarenakan adanya unsur budaya jawa yang melekat pada pura. Ini terlihat dari konstruksi bangunan dan juga ukir-ukiran yang ada pada dinding penyangga pendopo Pura.

Pura ini juga berfungsi untuk penanaman ilmu pengetahuan agama bagi anak-anak generasi Hindu. Perlu untuk diperhatikan adalah dengan terciptanya suasana hidup rukun, damai, harmonis juga toleransi yang terjadi antara pura dengan masyarakat setempat semakin menarik untuk diteliti.

C. Kondisi umat beragama di lingkungan Pura Eka Dharma

Saat ini, umat yang melakukan persembahyangan di Pura ini berkisar 500 orang lebih meliputi umat Hindu setempat (Jawa) dan umat Hindu pendatang (Bali) dan lain sebagainya. Jumlah umat Hindu, baik penyungung maupun di luar penyungung yang melakukan persembahyangan di Pura Eka Dharma semakin meningkat jumlahnya sejalan dengan perkembangan umat setempat, umat pendatang, kalangan mahasiswa. Bahkan disekeliling pura tersebut tidak hanya umat Hindu saja yang menempati wilayah tersebut, akan tetapi umat agama lain pun demikian.

BAB III

KONSEP-KONSEP TENTANG KERUKUNAN

MULTIKULTURAL

A. Kerukunan Multikultural Sebagai Sebuah Fenomena Keragaman dan Tonggak Pemersatu Agama-agama

Secara etimologi, kata kerukunan berasal dari bahasa arab yaitu *rukun* yang berarti tiang, dasar, sila. Jamak *rukun* adalah *arkan* artinya suatu bangunan sederhana yang terdiri dari berbagai unsur. Dari pengertian *arkan* diperoleh bahwa kerukunan merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai unsur yang berlainan dan setiap unsur tersebut saling menguatkan. Kesatuan tidak dapat terwujud jika ada di antara unsur tersebut yang tidak berfungsi.¹

Dalam pengertian sehari-hari, kata rukun dan kerukunan adalah damai dan perdamaian. Kerukunan hakiki adalah kerukunan yang didorong oleh kesadaran dan hasrat bersama demi kepentingan bersama. Jadi kerukunan hakiki adalah kerukunan murni, mempunyai nilai dan harga yang tinggi dan bebas dari segala pengaruh dan hipokrisis. Dalam pada ini, kerukunan antar umat beragama bukan berarti merelatifir agama-agama yang ada dengan melebur kepada satu totalitas (Sinkretisme Agama) dengan menjadi agama-agama yang ada itu sebagai mahzab dari agama totalitas itu, melainkan sebagai cara atau sarana untuk mempertemukan, mengatur hubungan luar

¹ Munawar Khalil, Kamus Bahasa Arab-Indonesia. Dan lihat pula, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1988, hlm 658.

antar orang yang tidak seagama dalam setiap proses kehidupan sosial kemasyarakatan.²

Urgensi kerukunan adalah untuk mewujudkan kesatuan pandangan yang membutuhkan kesatuan sikap, guna melahirkan kesatuan perbuatan dan tindakan. Dengan kerukunan umat beragama, masyarakat menyadari bahwa negara adalah milik bersama dan menjadi tanggung jawab bersama umat beragama. Karena itu, kerukunan antar umat beragama bukanlah kerukunan sementara, bukan pula kerukunan politisi, tapi kerukunan hakiki yang dilandasi dan dijiwai oleh agama masing-masing.³ Dalam mewujudkan kerukunan antar umat beragama diperlukan beberapa unsur sebagai penunjang utama. Unsur yang terkandung dalam pengertian kerukunan antar umat beragama:

- 1) Adanya beberapa subyek sebagai unsur utama.

Dengan subyek yang dimaksudkan disini adalah tiap golongan umat beragama itu sendiri. Tiap golongan umat beragama merupakan unsur utama dalam kerukunan ini. Sebenarnya unsur ini telah dipenuhi, karena di Indonesia terdapat beberapa agama yang dianut oleh sebagian besar bangsa Indonesia. Walaupun bangsa Indonesia terdiri dari pemeluk agama itu sendiri tidak melarang pemeluknya untuk rukun dengan pemeluk agama lain. Karena dengan kerukunan itu umat beragama dapat mempersempit jurang perbedaan dalam mengarah kepada tujuan dan kepentingan bersama sebagai satu bangsa. Memahami kebenaran agama masing-masing akan mendorong setiap subyek lebih maju dalam membina dan memelihara hubungan dan pergaulan yang telah terbina. Dengan demikian berarti setiap subyek telah memelihara kemerdekaan bangsanya dengan menghimpun hasrat dari setiap golongan

² Said Agil Husin Al Munawar, *Fikih Hubungan Antar Agama* (Jakarta : Ciputat Press, 2005), hlm.4-5.

³ *Ibid.*

agama menjadi hasrat kolektif sehingga terwujud keseimbangan keselarasan serta keharmonisan dalam kesatuan bangsa Indonesia.

2) Tiap subyek berpegang kepada agama masing-masing.

Tiap subyek harus menyadari, bahwa perbedaan agama bukan sebagai arena atau sarana persaingan yang tidak sehat. Berpegang kepada agama masing-masing dan memahami urgensi kerukunan, maka kerukunan antar umat beragama tidak lagi merupakan masalah yang hanya menjadi topik pembicaraan secara teoritis, tapi sarana untuk membuka jalan dalam mewujudkan kerukunan secara praktis dan pragmatis, sehingga kerukunan antar umat beragama tidak lagi mengendap dalam teori statis dengan status quo yang hanyut dengan arah dan tujuan yang tidak jelas.

3) Tiap subyek menyatakan diri sebagai partner.

Kerukunan meminta setiap subyek untuk menyatakan diri sebagai partner antar satu dengan lainnya. Kerukunan mempertemukan unsur-unsur yang berbeda, sedang toleransi merupakan sikap atau refleksi dari kerukunan. Tanpa kerukunan, toleransi tidak pernah ada, sedangkan toleransi tidak pernah tercermin bila kerukunan belum terwujud. Kerukunan umat beragama memiliki tujuan sebagai berikut : memelihara eksistensi agama-agama, memelihara eksistensi Pancasila dan UUD 1945, memelihara persatuan dan rasa kebangsaan, memelihara stabilitas dan ketahanan nasional, menunjang dan mensukseskan pembangunan, mewujudkan masyarakat religius.⁴

Kerukunan hidup umat beragama menjadi suatu yang sangat penting untuk diwujudkan. Namun perlu digarisbawahi bahwa kerukunan yang dikembangkan dimasa depan adalah kerukunan yang benar-benar autentik dan dinamis, merupakan refleksi dari ajaran setiap agama yang kita anut. Kerukunan seperti ini dilandasi

⁴ *Ibid.*

kesadaran bahwa walaupun terdapat perbedaan dari segi agama, tapi setiap orang mempunyai tanggung jawab yang sama untuk mengupayakan kesejahteraan bagi orang banyak. Di negara kita, yang memiliki Pancasila sebagai asas, kerukunan antar umat beragama harus diupayakan dan dikembangkan dalam konteks konsensus-konsensus yang dimiliki bangsa yaitu Pancasila, UUD 1945, GBHN, P4 dan wawasan nusantara sebagai prinsip hidup bernegara yang mengikat secara nasional.⁵

Dengan demikian kerukunan yang harus diupayakan adalah kerukunan yang tidak mengurangi atau membatasi, melainkan justru harus dikembangkan kebebasan beragama di tanah air. Kerukunan harus diwujudkan dalam keseimbangan yang dinamis, yaitu kebebasan yang tidak mematikan kebebasan. Kerukunan dalam konteks wawasan nusantara berarti, bahwa kerukunan itu diwujudkan dalam konteks kesatuan dan persatuan bangsa di dalam Negara Kesatuan Indonesia, yang tidak terkotak-kotak, berdasarkan suku, agama, ras dan lain-lain.⁶

Menyadari adanya dimensi misioner atau dakwah dari agama-agama maka kerukunan juga tidak boleh dimengerti sebagai sesuatu yang membatasi aspek misioner dari setiap agama. Pembatasan aspek misioner dari agama justru bisa diartikan sebagai penghilangan atau pengebirian substansi agama itu sendiri. Hal yang perlu disadari adalah bahwa dakwah atau penyebaran agama itu dilaksanakan secara dialogis dan benar-benar mencerminkan keluhuran agama itu sendiri, dan tidak dilakukan dengan pola-pola negatif (pemaksaan, bujukan, rayuan, dan lain-lain) yang justru bertentangan dengan ajaran agama.⁷

Pertama kalinya muncul pemikiran akan multikultural adalah di negara-negara maju. di Indonesia, menurut Muhaemin el Ma'hady, wacana multikultural mulai

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

⁷ Weinata Sairin dkk, *Kerukunan Umat Beragama Pilar Utama Kerukunan Berbangsa* (Jakarta : PT. BPK Gunung Mulia, 2002), hlm 10-11.

ramai diperbincangkan dikalangan akademisi, praktisi budaya dan aktifis di awal tahun 2000.⁸ multikulturalisme menurut Tilaar bukan sekedar pengenalan terhadap berbagai jenis budaya di dunia ini,⁹ tetapi multikulturalisme merupakan gerakan tuntutan dari kelompok imigran terhadap pemerintah baru yang ditempatinya agar diakui identitas kulturalnya serta diperlakukan adil. gerakan ini pertama muncul di negar maju (Barat), seperti Amerika Serikat, Inggris, Kanada dan Jerman.¹⁰

Munculnya wacana multikulturalisme sesungguhnya amat mengherankan, sebab apabila ditelusuri sejarah peradaban manusia, sebenarnya terdapat satu mimpi bahwa suatu saat di dunia ini pengelompokan manusia berdasarkan etnis dan bangsa-bangsa akan lenyap. Perang dunia telah memberi pelajaran bahwa bangsa-bangsa di dunia harus mewujudkan perdamaian. Monokulturalisme yang berupaya mengasimilasikan pelbagai budaya etnis menjadi satu kebudayaan besar dalam sebuah negara tidak berhasil, kemudian diganti dengan wacana multikulturalisme yang menyarankan pengakuan akan adanya banyak budaya etnis dalam sebuah negara.¹¹

Multikulturalisme dibedakan menjadi tiga macam : Pertama, multikulturalisme demografis yaitu masyarakat tertentu terdiri dari budaya yang berbeda-beda. Kedua, multikulturalisme holistik yaitu masyarakat tertentu yang menghargai keragaman budaya tetapi memberikan prioritas lebih tinggi pada kelekatan di kelompok besar. Ketiga, multikulturalisme politik yaitu mengakui keberadaan kelompok-kelompok

⁸ Muhaemin el Ma'hady, *Multikulturalisme dan Pendidikan Multikultural*, <http://216.59.104/search/cache:RtXjr SL23 sMJ:artikel.us/Muhaemin 6-04.html+masyarakat+m...>

⁹ Zubedi, *Pendidikan Berbasis Masyarakat* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), hlm.61.

¹⁰ Ada sebagian menganggap bahwa multikulturalisme merupakan gerakan arus balik dari gelombang globalisasi, globalisasi yang telah memunculkan kecenderungan kearah monokultural karena akibat imperialisme kebudayaan Barat. Tidak mengherankan apabila multikulturalisme mendapat baju baru yaitu gerakan politik.

¹¹ *Multikulturalisme : Membangun Harmoni masyarakat Plural*, Josep J Darmawan (ed), (Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 2005), hlm.30.

etnis dalam suatu masyarakat, dan mengakui adanya kebutuhan untuk mengekspresikan kepentingan secara tepat dalam struktur.¹²

Untuk membedakan multikultural dengan paham-paham lainnya disini akan disebutkan tentang karakteristik kunci 4 perspektif keagamaan :

Eksklusifisme	Inklusifisme	Pluralisme	Multikulturalisme
Sikap Terhadap Batasan			
satu jalan	dua jalan	integrasi agama dipertahankan	integrasi agama dihargai
tertutup	semi tembus	dapat tembus	terbuka
terpisah dan eksklusif	diutamakan terpisah, dapat berbaur	berbaur seperti minyak dan air	berhimpitan dan tumpang tindih
batasan jelas, dipertahankan	batasan semi, tersamar	mempertahankan semua batasan	dan memelihara semua batasan
sikap terhadap orang lain			
diskriminatif/asimilasi	toleran/okumene	menghargai perbedaan	keragaman hal biasa
komunikasi didaktik	sharing, resiprokal, dialog mutual	dialog mutual dengan menghargai	sharing dan kerjasama
diskredit	simpati	ko-eksistensi	pro-eksistensi
tidak kompromi, penyerahan total	kompromi setengah hati	kompromi tanpa menghilangkan identitas	kompromi proporsional dan rasional
eksplisit bersifat kolonial	implisit bersifat kolonial	anti-kolonial	post-kolonial
satu pandangan	satu dan banyak pandangan	multifaset, melihat pandangan sendiri dan orang lain tanpa merubah dan menentang	menghargai pandangan orang lain
berbeda, orang lain inferior	memiliki kesamaan	berbeda tapi sama	setara dalam perbedaan
kami vs mereka	kami dan mereka	kami, mereka, banyak	kita, banyak
hirarki dan superior	hirarki dan bermanfaat	tiada hirarki	tiada hirarki, saling mengisi
sikap terhadap sensibilitas			
hanya satu	banyak, integrasi orang inferior	banyak, dengan integrasi sendiri	banyak, saling menyapa
integritasku	integritas tersamar	multi integritas	multi integritas bermartabat

¹² A. Gerald Arbuckle, "Multiculturalism, Internationality, and Religious Life" dalam Review for Religious 54, 1995: 326-338.

B. Multikulturalisme Ditinjau dari Perspektif Teori

Dalam sejarahnya, bangsa Indonesia ternyata telah mampu mewujudkan kerukunan antar umat beragama. Hal ini terlihat pada sikap toleransi dan koeksistensi yang telah terjadi sekitar abad ke-9, yaitu pada Dinasti Sanjaya, yang mengungkapkan bahwa secara realitas bagaimana suatu kehidupan yang penuh kerukunan telah dibangun dan menjadi kekayaan bangsa yang tiada ternilai.

Selanjutnya, pembahasan tentang kerukunan antar umat beragama juga melibatkan seluruh masyarakat dan juga pemerintah. Adapun untuk menciptakan kerukunan disegala aspek kehidupan dibutuhkan adanya pemahaman tentang Tri Kerukunan Hidup Umat Beragama, yaitu sebagai berikut :

I. Kerukunan intern umat beragama

Kerukunan intern umat beragama adalah hubungan yang mengatur antara individu dengan orang-orang yang sama atau sepahaman keyakinannya.

II. Kerukunan antarumat beragama

Kerukunan ini terbangun dari semangat kebersamaan dan kekeluargaan yang menghargai perbedaan tanpa pemisah-misahan (*apartheid*). Kerukunan yang dihasilkan oleh diskriminasi, segregasi, dan *apartheid* adalah kerukunan yang palsu, jahat dan amoral sebab tidak didasari oleh kasih, kebenaran, keadilan dan kebebasan. Kerukunan yang benar dan baik adalah kerukunan yang pada satu pihak tidak menisbikan perbedaan-perbedaan yang ada, tidak pula memutlakkan perbedaan yang ada sedemikian rupa sehingga menutup pintu hubungan, percakapan dan kerjasama. Dengan demikian sinkretisme, sektarianisme, serta fundamentalisme bertentangan dengan semangat kerukunan hidup antar umat beragama yang dikehendaki. Kerukunan yang dimaksud ternyata lebih dari sekedar dorongan urgensi atau perhitungan untung-rugi yang lebih bersifat sosiologis pragmatis. Ia harus lahir

sebagai ekspresi iman, sebagai tindakan iman, artinya didalam ketaatan kepada Tuhan. Ini bermakna ganda, satu pihak ketaatan kepada Tuhan harus dinyatakan melalui sikap yang tulus dan terbuka dalam menjalin hubungan dengan orang-orang yang beragama/berkepercayaan lain. Dan dilain pihak, hubungan kerjasama dengan mereka yang beragama lain itu hanya dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan ketaatan iman kepada Tuhan. Inilah yang dimaksud dengan kerukunan beragama yang autentik, yaitu semangat kerukunan yang lahir dari iman dan keyakinan agama masing-masing. Disamping autentik, kerukunan juga merupakan sesuatu yang dinamik. Karena kerukunan itu terkait dengan kebebasan. Kerukunan tidak dihasilkan dan diatur secara eksternal melalui peraturan atau Undang-Undang, melainkan tumbuh secara autentik melalui penghayatan iman dan melalui dinamika perjumpaan(*encounter*) serta hidup bersama antar umat beragama yang berbeda.

III. Kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah

Kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah tergantung pada pemahaman dan penataan yang benar mengenai hubungan antar agama dengan negara. Yaitu dengan merumuskan interrelasi antar agama dan negara sehingga hubungan antara keduanya memungkinkan terlaksananya fungsi masing-masing secara optimal. Terdapat tiga teori tentang relasi agama dan negara, yaitu :

a). Teori *sub-ordinasi*, meyakini bahwa kerukunan antara agama dan negara akan tercapai maksimal apabila yang satu disubordinasikan kepada yang lain. Sehingga berkembang teori subordinasi agama oleh negara, seperti yang terdapat pada negara yang mengenal agama negara (*state religion*). Dan yang lain adalah teori subordinasi negara oleh agama, seperti yang terdapat di negara totaliter religius atau negara agama

(*religious state*). Yang satu agama harus tunduk kepada negara, yang lain negara harus tunduk kepada agama.

b). Teori *separasi*, menyatakan bahwa hubungan yang rukun antara agama dan negara akan tercipta dengan baik, apabila dua lembaga terpisah secara mutlak. Teori inilah yang kemudian digunakan oleh negara-negara demokrasi liberal.

c). Teori *koordinasi*, yang didalamnya baik *subordinasi* dan *separasi* ditolak dengan tegas. Agama dan negara mempunyai fungsi masing-masing, tetapi mempunyai misi pokok yang sama yaitu, menyejahterakan umat manusia.¹³

Beberapa prinsip etis dapat disimpulkan dari pembicaraan tentang multikulturalisme. *Pertama*, multikulturalisme menghormati keunikan manusia : "manusia adalah individu yang memiliki subyektivitas batin sendiri yang tak terjangkau oleh yang lain dan tidak sepenuhnya dapat diekspresikan. Setiap individu adalah "wajah" yang unik.¹⁴ *Kedua*, multikulturalisme menghormati bahwa manusia bersifat sosial. Sosialitas manusia adalah suatu transendensi yang memungkinkan manusia melampaui dirinya menuju pribadi yang lain. Hanya melalui transendensi itu individu mampu mewujudkan dirinya.¹⁵ *Ketiga*, multikulturalisme yang mengakui adanya banyak budaya dalam sebuah negara amat jelas menghormati keberadaan budaya-budaya lain. Dengan demikian secara implisit multikulturalisme menuntut adanya solidaritas yang luas tidak hanya terbatas pada kelompok sendiri. Cara berpikir multikulturalis menganggap negara dan bahkan dunia ini sebagai wilayah umum (*common space*) yang dapat ditinggali siapapun demi mendapatkan kesejahteraan. Cara berpikir multikulturalis juga menyarankan sebuah *new*

¹³ *Ibid.*, hlm. 21-34.

¹⁴ M Sastrapratedja, "Apa dan Siapa Manusia" dalam Tonny D. Widiatono (ed), *Pendidikan Manusia Indonesia*. Jakarta : Kompas, 2000)

¹⁵ *Ibid.*

neighborhood (hidup bersama yang baru).¹⁶ Keempat, visi multikulturalisme yang menghormati kesatuan bangsa manusia di dalam budaya yang beranekaragam bersifat persuasif, artinya memberi semangat untuk mencapai sesuatu yang lebih mulia. Kelima, multikulturalisme bukan berarti relativisme kultural (budaya). Maksudnya meskipun multikulturalisme menghormatikan aneka kelompok dan budaya yang ada tidak berarti bahwa semua budaya itu sama saja. Akan tetapi bahwa setiap budaya itu unik sehingga patut untuk dilestarikan keberadaannya.¹⁷

Ada beberapa teori yang bisa dikemukakan sebagai upaya melakukan pembangunan dalam masyarakat yang plural :

I. Teori tentang kekurangan biologis (*biological*).

Teori ini menyatakan adanya inferioritas terhadap suatu komunitas tertentu, seperti masyarakat kulit hitam di Amerika, yang diakibatkan oleh warna kulit atau hal-hal yang berasal dari genetik. Inferioritas genetik ini tidak bisa diubah melalui intervensi lingkungan. Teori ini secara umum kemudian tidak bisa diterima oleh komunitas *scientists*.

II. Teori tentang Cultural deficiency.

Teori ini berpusat pada anggapan mengenai karakteristik budaya yang diwariskan dari masa lampau dan diturunkan dari generasi ke generasi. Latar belakang dari suatu komunitas atau kelompok etnis, seperti motivasi, moral dan perilaku adalah alasan bahwa minoritas ras secara tidak proporsional ditemukan dalam posisi sub-ordinasi. Minoritas tidak diuntungkan karena adat-istiadat dan warisan khusus (*stereotype*) dari kelompok mereka, sehingga kemudian

¹⁶ *Multikulturalisme : Membangun Harmoni masyarakat Plural*, Josep J Darmawan (ed), (Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 2005), hlm.37.

¹⁷ *Ibid*, hlm.38.

Moynihan, D.P¹⁸ mengkritik secara luas anggapan perilaku orang kulit hitam sebagai menyimpang.

III. Teori diskriminasi struktural.

Teori ini berpandangan bahwa *cultural deficiency theory* mengabaikan sistem ekonomi politik yang mendominasi dan menekan minoritas.

C. Pola-pola yang dikembangkan Demi Tercapainya Kerukunan Multikultural

Salah satu pilar utama untuk memperkokoh kerukunan nasional adalah mewujudkan kerukunan antar umat beragama. Kerukunan umat beragama yang merupakan pilar penting untuk membangun persatuan nasional akan sangat rentan manakala kondisi sosial ekonomi, politik dan keamanan tidak sehat. Karena itu untuk mewujudkan kerukunan dan persatuan nasional diperlukan upaya perbaikan secara stimulan pada semua sektor.

Di bidang kerukunan umat beragama langkah kebijakan yang diambil oleh Departemen Agama pada awalnya adalah sosialisasi prinsip dasar kerukunan yaitu tidak saling mengganggu antar kelompok-kelompok agama yang berbeda-beda. Berkaitan dengan ini dikembangkan konsep *agree in disagreement* juga pendekatan trilogi kerukunan, yakni kerukunan intern, antar umat beragama, dan antara umat beragama dengan pemerintah.

Seiring dengan dinamika kehidupan yang terus berkembang dan semakin kompleksnya persoalan kerukunan maka fokus sekarang lebih diarahkan pada perwujudan rasa kemanusiaan dengan pengembangan wawasan multikultural serta dengan pendekatan yang bersifat "bottom up". Dalam kaitan ini kita akan mengembangkan wawasan multikultural pada segenap unsur dan lapisan masyarakat

¹⁸ D.S.Eitzen dan Maxine B.Z., *Sosial Problems*, A Viacom Company 160 Gould Street Needham Heigght, MA 02194 . 1997.

yang hasilnya kelak diharapkan terwujud masyarakat yang mempunyai kesadaran tidak saja mengakui perbedaan, tetapi mampu hidup saling menghargai, menghormati secara tulus, komunikatif dan terbuka, tidak saling curiga, memberi tempat pada keagamaan keyakinan, tradisi, adat maupun budaya dan yang paling utama adalah berkembang sikap tolong menolong sebagai perwujudan rasa kemanusiaan yang dalam dari ajaran agama masing-masing. Untuk menciptakan suasana rukun tersebut pada kalangan umat beragama, ditempuh strategi sebagai berikut :

- i. Membimbing umat beragama agar semakin meningkat keimanan dan ketakwaan kepada tuhan yang maha esa dalam suasana rukun, baik intern maupun antar umat beragama. Dalam hal ini kesadaran umat beragama akan didorong untuk lebih menghayati esensi ajaran setiap agama, yakni pertama, agama tidak diturunkan untuk menganjurkan kekerasan bagi pemeluk agama lainnya. Kedua, esensi setiap agama diturunkan ke dunia adalah untuk memberi manfaat dan kebaikan sebesar-besarnya bagi kehidupan sosial bersama umat manusia.
- ii. Melayani dan menyediakan kemudahan bagi penganut agama.
- iii. Tidak mencampuri urusan akidah atau dogma dan ibadah sesuatu agama.
- iv. Negara dan pemerintah membantu atau membimbing penunaian ajaran agama.
- v. Melindungi agama dari penyalahgunaan dan penodaan kesucian agama.
- vi. Pemerintah mendorong dan mengarahkan segenap komponen masyarakat untuk lebih meningkatkan kerjasama dan kemitraan dalam seluruh lapangan kehidupan masyarakat, bukan untuk hegemoni dan penindasan oleh suatu kelompok kepada kelompok lainnya.

- vii. Mendorong umat beragama agar mampu mempraktekkan hidup rukun dalam bingkai Pancasila, konstitusi dan dalam tertib hukum bersama.
- viii. Mengembangkan wawasan multikultural bagi segenap lapisan dan unsur masyarakat melalui jalur pendidikan, penyuluhan dan riset.
- ix. Meningkatkan pemberdayaan sumberdaya manusia untuk ketahanan dan kerukunan masyarakat bawah.
- x. Fungsionalisasi pranata lokal, seperti adat istiadat, tradisi dan norma-norma sosial yang mendukung upaya kerukunan.
- xi. Mengundang partisipasi semua kelompok dan lapisan masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing melalui kegiatan-kegiatan dialog, musyawarah, tatap muka, kerja sama sosial dan sebagainya.¹⁹

D. Hambatan-hambatan yang Menjadi Kendala Mewujudkan Kerukunan Multikultural

Berbicara mengenai kerukunan tentunya akan terdapat beberapa kendala-kendala demi tercapainya kerukunan antarumat beragama. Tantang terhadap pengembangan kerukunan tersebut, antara lain :

1) Tantangan masa kini

Pada hakikatnya bangsa Indonesia memiliki masyarakat yang plural, ini terlihat pada semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* (berbeda-beda tapi tetap satu). Dari pengertian ini perlu ditegaskan bahwa kesatuan ada karena adanya perbedaan, dan bukan sebaliknya perbedaan-perbedaan itu hanya penampilan yang semu dari suatu asas kesatuan. Oleh karena itu memerlukan kerukunan antar sesama sebagai sebuah keluarga besar. Dari sudut pandang inilah kemudian timbul benturan serta konflik yang mengandung SARA (Suku, Agama, Ras, Antar golongan) sebagai pencerminan

¹⁹ Said Agil Husin Al Munawar, *Fikh Hubungan Antar Agama* (Jakarta : Ciputat Press, 2005), hlm. XIV-XVII.

dari belum dihayatinya arti dan makna perlunya kerukunan antar sesama bangsa yang diwujudkan dengan cara musyawarah untuk mufakat sebagai pencerminan pemberlakuan demokrasi pancasila. Hal yang juga merupakan tantangan masa kini adalah bagaimana cara-cara melaksanakan dakwah dan misi. Dengan gambaran ini dakwah dan misi sekarang tidak lagi tepat, karena dilaksanakan dengan cara memenangkan untuk menguasai. Salah satu solusinya adalah diaolq sebagai misi, karena misi yang benar adalah dialog.

2) Tantangan masa depan

Tantangan masa depan bagi bangsa adalah bagaimana cara beragama dan berteologi di abad ke-21, yang merupakan abad informasi dan abad ilmu pengetahuan serta teknologi. Ini dituntut pula adanya keterbukaan, rasionalitas, efisiensi dan dinamika serta adanya informasi yang berkesinambungan. Abad ke-21 adalah era globalisasi menciptakan negara, budaya dan masyarakat tanpa batas (*borderless state, borderless culture and borderless society*). Dalam bidang agama juga akan menjurus pada agama tanpa batas (*borderless religion*).²⁰

²⁰ *Ibid.*, hlm.19-20

BAB IV

KERUKUNAN DI PURA EKA DHARMA

A. Faktor Perikat Terciptanya Kerukunan Multikultural di Lingkungan pura Eka Dharma

Ketidak harmonisan antar pemeluk agama dilatar belakangi oleh banyak faktor. Secara kategoris-simplistik, hal itu dapat dibedakan kedalam dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang mempengaruhi seseorang bersikap disebabkan paham keagamaannya terhadap ajaran agamanya. Seperti adanya kecenderungan pemahaman radikal-ekstrim dan fundamental-subjektif terhadap ajaran agama yang dianut. Faktor lainnya adalah adanya sikap bedonitas dan oportunitas dengan mengatasnamakan agama sebagai komoditas kepentingan telah menjadi petaka kemanusiaan yang berkepanjangan.¹

Faktor-faktor disharmonitas dalam relevansinya dengan hubungan beragama umat beragama di Indonesia. Salah satu upaya terpenting yang dilakukan dalam melestarikan kerukunan umat beragama secara abadi adalah keterlibatan pola dan materi pendidikan. Dalam pada itu, untuk tingkat akademisi dan masyarakat umum sebaiknya diadakan lembaga formal ataupun non formal tentang dialog keberagamaan yang bertujuan menciptakan kesepahaman dan saling pengertian. Kendala utama selama ini dalam menciptakan dialog antar agama cenderung elitisi, sehingga lapisan awam yang lebih besar jumlahnya tidak mendapatkan akses yang cukup yang menyebabkan pemahaman menjadi awam. Sejalan dengan hal itu, diperlukan dukungan yang kuat dari pemerintah untuk mewujudkan kerukunan antar umat

¹ Said Agil Husin Al Munawar, *Fikih Hubungan Antar Agama* (Jakarta : Ciputat Press,m 2005), hlm.xviii-xxi.

beragama. Dukungan yang dimaksud bukanlah campur tangan pemerintah terhadap persoalan internalisasi keyakinan agama melainkan menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemeluk umat beragama menjalankan ajaran agama dan interaksi sosial yang dilandasi oleh kejujuran dan saling pengertian.²

Namun, kendala terbesar yang menjadi perhatian pemerintah adalah soal kesenjangan sosial dan ketidakadilan. Permasalahan pluralisme agama adalah sebuah kekuatan besar untuk membangun persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam membangun kerukunan nasional, konflik dan disharmoni lahir bukan berasal dari agama sebagai akar tunggang, tetapi berasal dari akar serabut. Bila agenda ini dapat ditangani secara serius dan simultan, maka kita optimis kerukunan antar umat beragama akan dapat terwujud.³ Ada beberapa faktor perekat yang mempengaruhi terciptanya kerukunan multikultural di lingkungan pura Eka Dharma, antara lain :

1. Pemahaman dan pengamalan masing-masing umat menurut ajaran dan kepercayaannya.

Dengan cara memahami dan mengamalkan ajaran masing-masing agama secara sungguh-sungguh akan dapat meredakan suatu masalah yang berhubungan dengan agama, suku, dan ras. Akan tetapi jika tidak dapat memahami ajaran agamanya secara benar dan tidak dapat mengamalkannya maka akan terjadi hal yang tidak diinginkan, antara lain terjadinya silang pendapat yang nantinya berujung atas nama agama, suku, ras karena setiap agama mengajarkan kerukunan, persatuan dan kesatuan serta kerjasama dan hormat-menghormati.

2. Melaksanakan dialog umat beragama.

Dengan melaksanakan dialog antar umat beragama akan diketahui bagaimana rasa kepedulian antar agama untuk menjalin hubungan demi terlaksananya

² *Ibid.*, hlm.xxiii.

³ Said Agil Husin Al Munawar, *Fikih Hubungan Antar Agama* (Jakarta : Ciputat Press, 2005), hlm. XXIV.

kerukunan multikultural di lingkungan pura Eka Dharma secara adil dan makmur demi mewujudkan cita-cita yang sudah dibangun dengan susah payah.

3. Kondisi keamanan dan ketertiban yang kondusif di lingkungan pura.

Untuk menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban yang kondusif serta dinamis harus saling menjaga dan mempunyai sikap toleran serta saling menghormati antar umat beragama, tanpa adanya sikap saling mencurigai dan saling tuding melempar kesalahan yang belum jelas dilakukan oleh suatu kelompok tertentu atau pemeluk agama demi terlaksananya perdamaian dan selalu menjaga keutuhan bangsa dan negara demi persatuan dan kesatuan.

4. Kondisi sosial dan ekonomi yang stabil di masyarakat sekitar.

Kondisi ekonomi yang stabil dalam masyarakat juga mempengaruhi kerukunan di lingkungan pura. Ini dilihat semakin majunya masyarakat akan mempengaruhi pola pergaulan masyarakat terhadap perbedaan pendapat dan juga perbedaan ekonomi. Masyarakat akan lebih bisa menerima perbedaan dalam hal apapun, ini terkait dengan keragaman budaya dan juga keragaman agama yang ada di pura ini khususnya dan di masyarakat umumnya.

5. Pendidikan.

Faktor pendidikan juga mempengaruhi pola berpikir masyarakat terhadap keragaman yang ada. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kebebasan beragama yang diberikan oleh negara pada masing-masing orang untuk memeluk dan melaksanakan ibadahnya tanpa kekangan dari orang lain, juga dengan adanya arahan serta kebebasan untuk kita berkarya juga berpikir sesuai dengan yang diinginkan.⁴ Berdasarkan data yang penulis peroleh, prosentase tingkat kerukunan

⁴ Wawancara dengan Bapak Subari selaku staf Kesra desa Tamantirto, tanggal 20 Oktober 2008.

dan faktor yang mendorong kerukunan di lingkungan pura Eka Dharma dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

Tabel 1.

Tingkat Kerukunan Beragama di Pura Eka Dharma	
Sangat Rukun	21,80%
Rukun	70,00%
Tidak/Kurang Rukun	3,20%
Tidak tahu./Tidak menjawab	5,00%

Tabel 2.

Faktor yang Mendorong Kerukunan multikultural di Pura Eka Dharma	
Kesadaran Masyarakat	41,25%
Ajaran Agama	40,45%
Anjuran Pemerintah	14,80%
Tidak Tahu/Tidak menjawab	3,50%

B. Peran Pura Eka Dharma dalam Menciptakan Kerukunan Multikultural

Dalam upaya menciptakan kerukunan multikultural di pura Eka Dharma, masyarakat sekitar pura didukung dengan semua lapisan masyarakat berupaya melakukan pembinaan.

- a. Mengadakan forum pertemuan antar pemuka agama dengan umatnya.

Dalam rangka membina kerukunan hidup beragama, perlu diselenggarakan forum pertemuan tatap muka antara pemuka agama dengan umatnya masing-masing secara berkala.

- b. Pembentukan kader kerukunan antar umat beragama.

Membentuk dan membina kader-kader kerukunan hidup beragama yang terdiri dari para pemuda wakil dari majelis agama dan tokoh-tokoh agama. Kader-kader kerukunan tersebut hendaknya selain mampu mengerti, memahami dan menghayati kehidupan beragama juga hendaknya mampu menjadi motivator, dinamisator, dan stabilisator masyarakat dalam membina kerukunan hidup beragama.

- c. Membina serta memupuk sikap hidup rukun.

Sikap dan perilaku hidup rukun yang telah mengakar yang membudaya di kalangan masyarakat hendaknya dibina dan dipupuk dengan menerapkan kode etik pergaulan umat beragama. Upaya membina sikap hidup rukun tersebut dapat dilaksanakan melalui penyelenggaraan kerjasama sosial kemasyarakatan, kegiatan bantuan umat beragama dan forum-forum kegiatan lain yang melibatkan umat beragama.⁵

Dalam konsep Hindu, ada beberapa nilai ajaran yang relevan dengan kerukunan hidup beragama yang diantaranya adalah ajaran: *Tat Twan asi*, *Karmaphala* dan *Ajaran Ahimsa*. Ajaran Hindu adalah satu yaitu bersumber kepada Weda, akan tetapi adat istiadat dari umat Hindu didalam melaksanakan upacara agama tidak selamanya sama diantara yang satu dengan yang lainnya. Hal ini dibenarkan oleh ajaran-ajaran agama Hindu yang disebut *dosa mewacara* dan *dosa*,

⁵ Wawancara dengan Bapak Subari staf KesRa desa Tamantirto, tanggal 20 Oktober 2008.

kala, patra, sepanjang adat istiadat itu tidak bertentangan dengan inti ajaran agama.⁶ Weda dijadikan sebagai kitab suci agama Hindu juga sebagai pedoman hidup umat Hindu, yang mengajarkan tentang keselarasan dan keharmonisan antara alam dengan manusia, manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhan (Sang Hyang Widi Wasa).⁷

Nilai kerukunan juga termuat dalam ajaran *Tata Susila Hindu*. Tata Susila merupakan ajaran pengendalian diri dalam pergaulan hidup. manusia sebagai makhluk sosial, ia tidak hidup sendian, ia selalu bersama–sama dengan orang lain. Manusia hanya dapat hidup bersama–sama dengan orang lain. Hanya dalam hidup bersama, manusia dapat berkembang dengan wajar. Untuk mewujudkan keselarasan dan kerukunan sebagaimana dimaksud, maka ajaran Tata Susila diapresiasi dalam bentuk ajaran *Tri Kaya Parisuda* yang artinya tiga perilaku manusia yang disucikan :

1. *Manachika Parisudha*, yaitu berpikir yang baik dan benar
2. *Wacika Parisudha*, yaitu berkata yang baik dan benar
3. *Kayika Parisudha*, yaitu yang berbuat baik dan benar

Jika ketiga hal diatas dapat dikendalikan dengan baik dan benar, maka dengan sendirinya kerukunan sesama makhluk ciptaan Tuhan itui dapat diwujudkan dalam hidup ditengah – tengah masyarakat yang majemuk.

Lebih lanjut, nilai kerukunan dapat dilihat dalam ajaran tentang *karma Phala*. Keyakinan tentang *Karma Phala* tertuang dalam *Sradha* yang kelima dari lima *Sradha* dalam ajaran Hindu. Apa yang diperbuat oleh manusia akan menghasilkan akibat dari perbuatannya. Ada akibat yang baik dan ada akibat yang buruk. Akibat

⁶*Musyawah Intern Umat Beragama, Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama Departemen Agama RI(Jakarta : - , 1980-1981), hlm. 133.*

⁷ Wawancara dengan Bapak Ali Gono selaku Ketua PHDI cab Kecamatan, tgl 26 September 2008.

dari perbuatan yang baik memberikan rasa senang dan akibat yang buruk memberikan kesusahan ataupun penderitaan.⁸

Oleh karena itu, ajaran Hindu mengajarkan kepada umatnya untuk selalu berbuat yang baik. Karmapala sebagai hukum sebab akibat dapat dijadikan suatu pedoman dalam menjalin kerukunan. Ajaran ahimsa merupakan salah satu bentuk penerapan nilai-nilai kerukunan antar umat beragama dari sisi pandang Hindu. Ahimsa berarti tidak membunuh, tidak menyakiti makhluk lain adalah kebijakan yang utama atau dharma yang paling tinggi. Ahimsa adalah perjuangan tanpa kekerasan. Jika melanggar hukum alam, maka akibatnya alam akan berbalik melanggar orang yang melanggarnya. Perilaku yang bersifat pengrusakan, mengancam, membakar emosi dan semacamnya bertentangan dengan prinsip ahimsa karma, termasuk di dalamnya menyakiti hati orang lain atau agama orang lain yang niatnya tidak baik, maupun kata-kata yang kasar, pedas dan mengumpat. Bila perbuatan ini terjadi maka terlambatlah usaha untuk mewujudkan kerukunan multikultural.⁹

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diperoleh kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah, sebagai berikut :

1. Faktor perekat yang menyebabkan kerukunan multikultural di lingkungan pura Eka Dharma, antara lain : Pemahaman dan pengamalan masing-masing agama, Melaksanakan dialog umat beragama, Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, Kondisi sosial dan ekonomi yang stabil, Pendidikan.
2. Peran pura Eka Dharma demi menciptakan kerukunan multikultural : Forum pertemuan pemuka agama, Pembentukan kader kerukunan umat beragama, membina dan memupuk sikap yang rukun.

B. Saran-Saran

Demikianlah hasil yang diperoleh dalam penelitian mengenai Pola Pengembangan Kerukunan Berwawasan Multikultural di Pura Eka Dharma Kasihan Bantul. Selanjutnya, penulis ingin menyampaikan saran-saran kepada :

a. Kaum Akademisi

Penulis berharap kepada para peneliti selanjutnya, dalam melakukan sebuah penelitian baik penelitian bidang keagamaan, sosial-budaya, ekonomi, maupun politik hendaknya bersifat obyektif dengan menggambarkan fakta sebenarnya yang ada di lapangan, dengan demikian hasil yang didapatpun murni sebuah karya baru yang dapat bermanfaat bagi masyarakat sekaligus memberikan sumbangsih bagi dunia pendidikan.

b. Masyarakat

Dalam sebuah penelitian, masyarakat mempunyai peranan yang kuat sebagai satu-satunya sumber yang dapat memberikan informasi kepada para peneliti guna memperoleh data yang diinginkan. Untuk itu, masyarakat haruslah bersikap terbuka dan ikut berperan dengan mendukung setiap kegiatan ataupun agenda yang mengaju kepada kemaslahatan umat manusia.

c. Lembaga Agama

Lembaga Agama diharap mampu mengarahkan pada masing-masing umatnya untuk menghormati umat beragama lain, tolong dan terbuka serta dapat memberikan solusi dalam menghadapi konflik-konflik yang terjadi di dalam masyarakat khususnya yang berkenaan dengan agama

d. Pemerintah

Peran pemerintah disini sangat kuat demi mewujudkan cita-cita bersama yakni mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Hendaknya pemerintah mendukung setiap kegiatan yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan,

dalam hal ini tidak hanya kemiskinan materi akan tetapi kemiskinan moral dan kemiskinan pendidikan.

C. Kata Penutup

Dengan rasa syukur alhamdulillah atas karunia-Nya, penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini walaupun masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan.

Oleh karena itu, demi kesempurnaan skripsi ini, penulis masih membutuhkan kritik dan saran untuk menyempurnakannya lebih lanjut.

Akhirnya penulis berdoa penulisan skripsi ini dapat membawa bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat umumnya. Lebih dari itu penulis juga berharap mudah-mudahan skripsi ini dapat menjadi bahan bagi peneliti selanjutnya dan dapat dikembangkan lebih luas lagi. Amin.

Penulis

SUSANTI

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mursyid. 1999-2000. *Studi Kasus Keagamaan dan Kerusuhan Sosial : Profil Kerukunan Hidup Beragama*. Jakarta : Balitbang Depaq.
- Arifin. 1997. *Menguak Misteri Ajaran Agama - Agama Besar*. Jakarta : Golden Taravon Press.
- Bagus Pudja, Ida. 2001. *Musyawah Antar Umat Beragama "Renungan dan Pemikiran"* . (makalah yang disampaikan dalam forum Musyawarah Antar Umat Beragama Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta : Departemen Agama, 6 September).
- Cenwill Smith, Wilfred .1976. *Religious Diversity* . New York : Harper and Row Publisher.
- Daya, Burhanuddin. 2004. *Agama Dialogis : Merenda Dialektika idealita dan Realita hubungan Antar Agama*. Yogyakarta : Mataram Minang Lintas Budaya.
- Departemen Agama. 2001. *"Kerukunan Intern Umat Beragama Sebagai Sarana Bagi Terciptanya Ukhuwah Islamiyah"* . Makalah yang disampaikan dalam forum Musyawarah Umat Beragama Departemen Agama Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Farhani, Isa. 2002. *"Kerukunan Antar Umat Beragama Di Kota Yogyakarta"*. Perbandingan Agama, Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga.
- Ghazali, Adeng Muchtar. 2005. *Ilmu Studi Agama*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ginting, Sahnan. <http://indoforum.org/showpost.php?p=645373&postcount=9>.
- Hadikusuma, Hilman. 1993. *Antropologi Agama*. Bagian I dan II. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Hendro, D. 1982. *Sosiologi Agama*. Yogyakarta : Kanisius.
- Icrp@cbn.net.id
- Imam Asy' Arie, Sapari . 1981. *Metode Penelitian Sosial* . Surabaya : Usaha Nasional.
- Koentjaraningrat. 1980. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta : Aksara baru.
- Koentjaraningrat. 2000. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta : Bina Cipta.
- Mardalis. 1995. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Sosial* . Jakarta : Bumi Aksara.
- Marzuki, Ahmad. 1981. *Pembinaan Kehidupan Beragama Dalam Masyarakat Untuk Mensukseskan Pembangunan*. Jakarta : Departemen Agama.

Munhanif, Ali.” *Prof. Dr. H. A. Mukti Ali : Modernisasi politik - keagamaan Orde Baru*”.

Musyawaharah Intern Umat Beragama. 1980-1981. Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama Departemen Agama RI. Jakarta.

Narwoko, J Dwi dan Bagong Suyanto (ed).2006. *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan*. Edisi Kedua. Jakarta : Kencana.

Nazir, Moh. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Puspito, Hendro. 1983 .*Sosiologi Agama* . Yogyakarta : Kanisius.

Smith, Wilfred Cenwill.1976.*Religious Diversity*. New York : Harper and Row Publisher.

Sucipto. 2001. *Kerukunan Umat Beragama Dari Sudut Pandang Agama Itu*. (makalah yang disampaikan dalam forum Musyawarah Antar Umat Beragama Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta : Departemen Agama, 4 September).

Sumartana dkk. 1993. *Dialog : Kritik dan Identitas Agama*. Yogyakarta : DIAN/ Interfidei.

Suparlan, Parsudi. 1981-1982 .*Pengetahuan Budaya, ilmu - ilmu sosial dan Pengkajian Masalah Agama*. Jakarta : Proyek Penelitian Keagamaan BALITBANG Depag RI.

Suprayogo, Imam dan Tobroni. 2003. *Metodologi penelitian Sosial – Agama* . Bandung : PT Remaja Rosda karya.

Supriyo. 2001. *Kerukunan Umat Beragama* .(makalah yang disampaikan dalam forum Musyawarah Antar Umat Beragama Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta : Departemen Agama, 5 September).

Taufik, Muhammad. 2001. ”*Kerukunan Hidup Beragama Di Lingkungan Masyarakat Sekitar Vihara Mendut Kecamatan Mugkid Magelang*”. Perbandingan Agama, Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga.

Toha, Anis Malik (artikel). “Religionswissenschaft, antara Objektivitas dan Subjektivitas Praktisnya”, *Majalah Islamia* edisi 8/2006.

Zainuddin Daulay dkk. 2002..*Riuh Di Beranda : Peta Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia*. Bagian Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragama, Pusat Litbang Beragama, Badan Litbang Agama & Diklat Keagamaan, Departemen Agama RI.

Zamari. 2001.*Kondisi Umat Beragama* .Yogyakarta : Departemen Agama Daerah Istimewa Yogyakarta.

Lamp 1

PEDOMAN OBSERVASI

Waktu :

Tempat :

1. Mengamati orang-orang yang terlibat dalam Pengembangan Kerukunan berawasan Multikultural.
2. Mengamati kondisi geografis, sosial dan keagamaan masyarakat.
3. Mengamati kondisi lapangan yang berhubungan dengan Pengembangan Kerukunan Berawasan Multikultural.



Lamp 2

PEDOMAN WAWANCARA

Nama Informan :
Umur Informan :
Pekerjaan Informan :
Waktu Wawancara :
Tempat Wawancara :

Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana pandangan Bapak/ Ibu/ Saudara/i tentang kerukunan ?
2. Bagaimana pendapat Bapak/ Ibu/ Saudara/i tentang multikultural ?
3. Bagaimana kebebasan beragama menurut Bapak/ Ibu/ Saudara/i ?
4. Apakah agama sangat mempengaruhi dalam kehidupan Bapak/ Ibu/ Saudara/i?
5. Bagaimanakah sikap Bapak/ Ibu/ Saudara/i terhadap pelaksanaan ibadah agama dalam masyarakat ?
6. Bagaimanakah kondisi kerukunan di kecamatan ini ?
7. Apakah perbedaan agama/ keyakinan juga mempengaruhi tingkat kerukunan masyarakat ?
8. Bagaimana peran lembaga agama dalam menciptakan kerukunan berwawasan multikultural ?
9. Apakah pemahaman dan pengamalan terhadap agama sangat mendukung terciptanya kerukunan tersebut ?
10. Apakah kondisi sosial ekonomi yang stabil dapat mempengaruhi kerukunan dalam masyarakat berkaitan dengan multikultural ?
11. Apakah ada pelaksanaan pembinaan kerukunan yang ditawarkan oleh lembaga agama ?
12. Apa sajakah cara- cara yang dikembangkan lembaga agama demi terciptanya kerukunan berwawasan multikultural ?
13. Apakah pola pengembangan kerukunan berwawasan multikultural ini dapat diterapkan dan berguna bagi masyarakat ?

Lamp 3

PEDOMAN DOKUMENTASI

Waktu :

Tempat :

1. Mengumpulkan data keadaan geografis, sosial dan keagamaan melalui monografi yang ada di Pura Eka Dharma kecamatan Kasihan Bantul.
2. Mengumpulkan arsip dan hasil penelitian yang pernah ada, baik dari instansi terkait maupun perorangan.



Lamp 4

DAFTAR RESPONDEN

1. Kep. KanWil Departemen Agama DIY
2. Kep. Kantor Departemen Agama Kota Yogyakarta
3. Kep. Camat Kasihan
4. Kep. Lurah Gonjen
5. Ket. FKUB Yogyakarta
6. Keluarga Bpk.....Tokoh agama Hindu
7. Keluarga Bpk.....Warga kecamatan.....



CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : SUSANTI
TTL : Metro, 18 Maret 1985
NIM : 04521724
Alamat Jogja : Jl. Pedak Baru No. 433 Karang Bendo Banguntapan
Bantul, DIY

Nama Orang Tua

- a. Ayah : Rustam
- b. Ibu : Suwarni
- c. Alamat : Jl. Sumbawa I Gg. Paris No. 26 Ganjar Asri Kodya
Metro Lampung

Riwayat Pendidikan :

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| 1. SD Negeri 1 Metro | Lulus tahun 1998 |
| 2. SMP Negeri 2 Metro | Lulus tahun 2001 |
| 3. SMA Negeri 2 Metro | Lulus tahun 2004 |
| 4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | Masuk tahun 2004 |